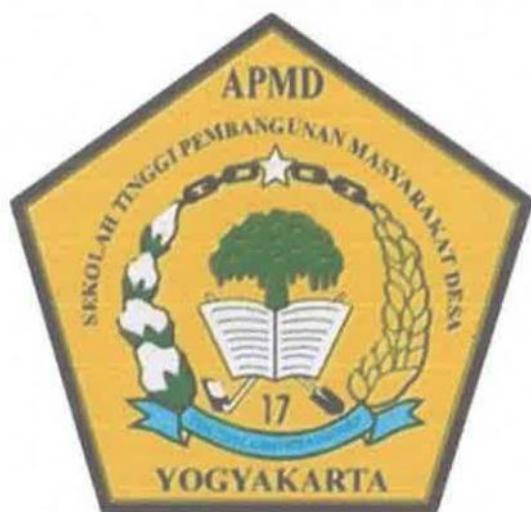


**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM
MENJADIKAN KABUPATEN TERINOVATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh :
SATRIO DANAN JAYA RAMADHAN
21520058

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN JUDUL
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM
MENJADIKAN KABUPATEN TERINOVATIF

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 01 Agustus 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Satrio Danan Jaya Ramadhan
NIM : 21520058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Menjadikan Kabupaten Terinovatif**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Satrio Danan Jaya Ramadhan

NIM. 21520058

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Satrio Danan Jaya Ramadhan
NIM : 21520058
Telp : 0812-2519-0531
Email :
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Menjadikan Kabupaten Terinovatif**” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Satrio Danan Jaya Ramadhan

NIM. 21520058

MOTTO

1. *"Innovation distinguishes between a leader and a follower."*
- **Steve Jobs**
2. *"Inovasi adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai peluang, bukan ancaman."*
- **Peter Drucker**
3. *"The best way to predict the future is to create it."*
- **Peter Drucker**
4. *"Keberhasilan inovasi tidak hanya terletak pada teknologi yang canggih, tetapi pada kemampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat."*
- **Clayton Christensen**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.
3. Teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Menjadikan Kabupaten Terinovatif". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Yogyakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan Kabupaten Wonogiri yang konsisten meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif selama lima tahun berturut-turut dalam ajang Innovative Government Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Prestasi tersebut menunjukkan adanya strategi yang tepat dan sistematis dalam mengembangkan inovasi daerah. Melalui pendekatan analisis SWOT, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam strategi-strategi yang diterapkan serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

2. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
4. Bupati Wonogiri beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya Heru Utomo, S.H., M.H., selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah beserta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Para informan penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga untuk kelengkapan data penelitian.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang inovasi pemerintahan daerah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBERAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Fokus Penelitian | 9 |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Literatur Review | 12 |
| F. Kerangka Konseptual | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 29 |
| H. Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 34 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI .. | 37 |
| A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Wonogiri..... | 37 |
| B. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah..... | 37 |
| C. Inovasi-inovasi Kabupaten Wonogiri..... | 43 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Hasil Penelitian..... | 51 |
| 1. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal | 51 |
| 2. Alternatif Strategi Pengembangan Inovasi Kabupaten Wonogiri.... | 72 |
| 3. Prioritas Strategi untuk Menjadi Kabupaten Terinovatif..... | 80 |
| B. Pembahasan | 84 |
| 1. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT | 84 |
| 2. Alternatif Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Pengembangan Inovasi | 87 |
| 3. Prioritas Strategi untuk Menjadi Kabupaten Terinovatif..... | 91 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 96 |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Daftar Pemenang Kabupaten Terinovatif Innovative Government Award Tahun 2020-2024 | 4 |
| Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Wonogiri | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Alur Analisis Data Miles dan Huberman | 34 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi BAPPERIDA | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Penelitian
2. Peta Wilayah Kabupaten Wonogiri
3. Dokumentasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi di Kabupaten Wonogiri, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat serta bagaimana pengalaman inovasi tersebut menjadi keunggulan kompetitif. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana Kabupaten Wonogiri mengelola dan mengembangkan inovasi di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci (pimpinan daerah, kepala OPD, serta staf terkait), observasi partisipatif terhadap proses kerja dan rapat koordinasi, serta analisis dokumentasi resmi (SK, Perda, APBD, laporan evaluasi, dan *best practices*). Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi di Kabupaten Wonogiri didukung oleh kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen kuat, ditunjukkan melalui penekanan inovasi sebagai agenda utama dan alokasi sumber daya yang konsisten. Sistem koordinasi antar OPD yang terstruktur dan rutin, dibuktikan dengan komunikasi lancar tanpa ego sektoral, menjadi pilar penting yang memfasilitasi kolaborasi lintas sektoral. Pengalaman sukses yang terakumulasi selama lima tahun berturut-turut sebagai Kabupaten Terinovatif menjadi modal berharga dan *competitive advantage* yang sulit ditiru, didukung oleh *institutional memory* dan pembelajaran berkelanjutan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran riset dan inovasi menjadi tantangan nyata, namun diatasi melalui kreativitas, optimalisasi sumber daya, dan kemitraan strategis. Selain itu, kesenjangan kemampuan teknologi di antara SDM, meskipun diakui dan diatasi melalui pelatihan, tetap memerlukan pengembangan kapasitas yang lebih intensif. Kesimpulannya, Kabupaten Wonogiri telah berhasil membangun ekosistem inovasi yang kuat melalui kepemimpinan yang transformatif, koordinasi yang efektif, pengalaman yang terakumulasi, dan strategi cerdas dalam menghadapi keterbatasan. Faktor-faktor ini secara sinergis berkontribusi pada pencapaian predikat Kabupaten Terinovatif, namun perhatian berkelanjutan terhadap pengembangan SDM digital dan optimalisasi anggaran tetap krusial untuk keberlanjutan inovasi di masa depan.

Kata Kunci:, analisis SWOT, inovasi daerah, strategi pemerintah, Wonogiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inovasi dalam pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien. Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dan mengimplementasikan strategi-strategi baru demi meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi bukan hanya sekadar pengenalan teknologi baru, tetapi juga meliputi cara-cara baru dalam merumuskan kebijakan, berinteraksi dengan masyarakat, serta menciptakan solusi yang lebih inovatif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan adanya inovasi, diharapkan pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta pengelolaan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi harus dipandang sebagai upaya strategis untuk menciptakan tatanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Pemda harus berperan aktif dalam menggali potensi lokal serta menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Banyak daerah di Indonesia yang mulai menunjukkan geliat inovasi dengan menerapkan berbagai program dan kebijakan yang bersinergi dengan aspirasi warganya. Dengan semakin banyaknya daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat diharapkan bahwa semangat kompetisi di antara daerah akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong setiap kabupaten dan kota untuk berinovasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Inovasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan akan sangat berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai kabupaten terinovatif. Dengan memahami proses dan strategi yang telah dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan daerah lain serta memberikan wawasan mengenai implementasi kebijakan inovatif di Indonesia.

Regulasi mengenai inovasi daerah memegang peranan penting dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang kondusif untuk perkembangan inovasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan hukum yang fundamental. Undang-undang ini menekankan bahwa otonomi daerah sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini berarti bahwa setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menciptakan solusi yang dianggap paling efektif untuk masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai karakteristik daerah sangatlah penting agar kebijakan yang diambil mampu menghasilkan dampak yang positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, juga menegaskan pentingnya partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan inovasi daerah. Di dalamnya, pemerintah menggariskan bahwa keberhasilan inovasi tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan upaya pemerintah semata. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk

menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, berbagai perspektif dan keahlian dapat digabungkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam praktiknya, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan memastikan bahwa inovasi yang diluncurkan sesuai dengan harapan serta memberikan manfaat langsung kepada semua pihak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, juga mengatur tentang penilaian dan pemberian penghargaan bagi daerah yang menunjukkan prestasi dalam inovasi. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengakui dan menghargai usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik melalui inovasi, tetapi juga untuk mendorong kompetisi sehat antara kabupaten. Dengan adanya penghargaan, diharapkan daerah lain termotivasi untuk melakukan perbaikan dan menciptakan layanan yang lebih baik. Standar penilaian yang jelas akan memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program-program inovatif. Dengan demikian, regulasi semacam ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pencapaian inovasi di tingkat kabupaten, berikut ini adalah disajikan daftar pemenang *Innovative Government Award* untuk periode tahun 2020 hingga 2024 yang mencerminkan keberhasilan berbagai kabupaten dalam menerapkan program dan kebijakan inovatif

yang berdampak positif bagi masyarakat, serta menyoroti konsistensi Kabupaten Wonogiri dalam mencapai penghargaan ini selama bertahun-tahun.

Tabel 1
Daftar Pemenang Kabupaten Terinovatif Innovative Government Award Tahun 2020-2024

| Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Situbondo • Wonogiri • Bogor • Temanggung • Banyuwangi • Lampung Barat • Musi Rawas • Hulu Sungai Selatan • Malang • Sumenep | <ul style="list-style-type: none"> • Banyuwangi • Wonogiri • Bogor • Tabalong • Tegal • Indragiri Hilir • Muara Enim • Hulu Sungai Selatan • Mojokerto • Tanggamus • Bojonegoro | <ul style="list-style-type: none"> • Banyuwangi • Bogor • Wonogiri • Tabalong • Sragen • Temanggung • Situbondo • Padang • Indragiri Hilir • Hulu Sungai Selatan • Pamekasan • Tanggamus | <ul style="list-style-type: none"> • Wonogiri • Banyuwangi • Situbondo • Sragen • Bogor • Bangka • Tabalong • Padang • Pamekasan • Temanggung • Boyolali • Mesuji • Blora • Klaten • Hulu Sungai Selatan • Sampang | <ul style="list-style-type: none"> • Banyuwangi • Situbondo • Sragen • Wonogiri • Balangan • Padang • Pariaman • Tabalong • Bogor • Bangka • Sampang • Boyolali • Mesuji • Bangkalan • Blora • Ogan Ilir • Sidoarjo • Pamekasa |

Sumber : bskdn.kemendagri.go.id. 2024

Tabel di atas menunjukkan daftar pemenang Kabupaten Terinovatif dalam ajang *Innovative Government Award* dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam periode tersebut, Kabupaten Wonogiri berhasil meraih penghargaan secara berturut-turut, menonjolkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain Wonogiri, beberapa kabupaten lain seperti Banyuwangi dan Bogor juga tampil sebagai pemenang di berbagai tahun, tetapi prestasi Wonogiri yang konsisten selama lima tahun berturut-turut menunjukkan keunggulan dalam strategi dan pelaksanaan program inovatif. Hal ini

bisa jadi menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan serta program yang diterapkan di Kabupaten Wonogiri sangat berhasil dan diakui oleh institusi pemberi penghargaan.

Kabupaten Wonogiri, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan melalui peningkatan inovasi. Penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif yang diterima secara berturut-turut dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, menjadi bukti nyata akan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi untuk menggali potensi yang ada. Dalam konteks hukum tata negara, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas menerapkan kebijakan, namun juga harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini penting agar setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Beberapa inovasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang bertarung di IGA 2024 adalah Cinta Mutiara Keluarga (CMK) dan Mitra Desa. CMK adalah sebuah aplikasi inovasi berbasis digital yang dipergunakan dalam upaya konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan proses input data penimbangan serentak, penghitungan prevalensi stunting, dan monitoring serta evaluasi program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Mitra Desa merupakan inovasi non-digital yang digawangi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri dalam upaya fasilitasi penerbitan NIB dan IUMK bagi UMKM. DPMPTSP

menggandeng relawan yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) dan Mahasiswa KKN di Kabupaten Wonogiri sebagai Mitra Desa.

Meskipun Kabupaten Wonogiri telah menunjukkan prestasi yang konsisten dalam bidang inovasi, terdapat beberapa permasalahan strategis yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, tantangan untuk mempertahankan konsistensi inovasi dalam jangka panjang menghadapi dinamika perubahan teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Fenomena ini terlihat dari beberapa daerah yang pernah meraih penghargaan serupa namun kemudian mengalami penurunan prestasi karena ketidakmampuan mempertahankan momentum inovasi. Kedua, intensifikasi persaingan antar daerah dalam bidang inovasi semakin menguat, dimana daerah-daerah lain mulai mengadopsi dan mengembangkan praktik terbaik yang serupa, bahkan berusaha mengungguli prestasi yang telah dicapai Wonogiri. Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih sophisticated dan berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.

Secara akademis, terdapat gap penelitian yang signifikan dalam memahami faktor-faktor strategis yang menentukan keberhasilan inovasi daerah secara konsisten. Mayoritas penelitian terdahulu lebih fokus pada evaluasi dampak program inovasi spesifik atau analisis deskriptif tentang praktik inovasi, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif strategi holistik yang memungkinkan suatu daerah mempertahankan status sebagai daerah terinovatif. Padahal, pemahaman mendalam tentang strategi yang efektif ini sangat diperlukan tidak hanya untuk keberlanjutan inovasi di daerah yang bersangkutan, tetapi juga sebagai model pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kemampuan inovasinya. Keterbatasan

penelitian yang menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengkaji strategi inovasi daerah secara sistematis juga menjadi celah yang perlu diisi, mengingat pendekatan ini dapat memberikan framework yang komprehensif untuk memahami kompleksitas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan inovasi.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan praktis untuk mengidentifikasi formula sukses yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas inovasinya guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak semua daerah memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan strategi inovasi yang efektif. Pengalaman Kabupaten Wonogiri yang telah terbukti berhasil selama lima tahun berturut-turut dapat menjadi pembelajaran berharga, namun hal ini memerlukan kajian ilmiah yang sistematis untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat ditransfer dan diadaptasi sesuai dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Secara hermeneutik, fenomena inovasi di Kabupaten Wonogiri dapat dipahami sebagai sebuah interpretasi berkelanjutan dari realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Inovasi bukan sekadar produk atau proses baru, melainkan sebuah dialog mendalam antara pembuat kebijakan, aparatur pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan konteks lokal yang spesifik. Memahami mengapa inovasi tertentu diadopsi atau ditolak, bagaimana makna "inovatif" itu sendiri dibentuk dan dinegosiasikan dalam berbagai kelompok, serta bagaimana narasi keberhasilan atau kegagalan inovasi dibangun, memerlukan

upaya interpretatif yang mendalam. Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya berupaya mendeskripsikan program inovasi yang ada, tetapi juga menggali lapisan makna yang tersembunyi di balik berbagai praktik, kebijakan, dan persepsi terhadap inovasi di Kabupaten Wonogiri. Melalui pendekatan hermeneutik, kita akan mencoba memahami bagaimana pemahaman (*verstehen*) atas kebutuhan, tantangan, dan aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi tindakan inovatif, serta bagaimana makna-makna yang dihasilkan dari inovasi tersebut membentuk pemahaman baru tentang pembangunan daerah itu sendiri.

Pemilihan judul "Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dalam Menjadikan Kabupaten Terinovatif Tahun 2024" didasari oleh kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak positif kepada masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan mengingat Kabupaten Wonogiri telah memperoleh pengakuan sebagai Kabupaten Terinovatif berturut-turut dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mengkaji strategi yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan inovatif dapat diimplementasikan dalam konteks lokal yang unik. Temuan dari penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan strategi pemerintah, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang konstruktif bagi daerah lain yang ingin meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi dasar yang kuat untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam inovasi pemerintahan serta

kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, dengan demikian rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggunakan analisis SWOT dalam mencapai status sebagai Kabupaten Terinovatif?.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai status sebagai Kabupaten Terinovatif menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats*). Penelitian secara spesifik mengkaji tiga aspek utama: (1) mengidentifikasi kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pengembangan inovasi daerah; (2) merumuskan alternatif strategi pengembangan inovasi berdasarkan kombinasi faktor-faktor SWOT; dan (3) menentukan prioritas strategi yang paling efektif untuk mempertahankan status kabupaten terinovatif. Subjek penelitian meliputi elit politik dan pejabat pemerintah, pengelola teknis inovasi di BAPPERIDA dan OPD terkait, pemangku kepentingan eksternal (tokoh masyarakat, akademisi), serta mitra strategis dari sektor swasta dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pengembangan inovasi. Objek penelitian mencakup strategi inovasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai Kabupaten Terinovatif.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tujuan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats*) yang dihadapi pemerintah dalam implementasi strategi inovasi.
2. Merumuskan berbagai alternatif strategi pengembangan inovasi berdasarkan kombinasi faktor SWOT melalui matriks SWOT (SO, WO, ST, WT) yang dapat diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Mengetahui prioritas strategi paling efektif untuk mempertahankan status Kabupaten Terinovatif dengan mempertimbangkan kelayakan implementasi, ketersediaan sumber daya, dampak strategis, dan keberlanjutan jangka panjang. Sedangkan manfaat yang diharapkan pada hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan inovasi, serta hubungan antara kebijakan publik dan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat jadi bahan referensi penting bagi peneliti lain yang mau mendalami lebih jauh tentang inovasi daerah, konsep pemerintahan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Data dan analisis yang disajikan bisa membuka jalan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai isu-isu terkait.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memicu diskusi dan kajian akademis lebih lanjut di kalangan mahasiswa dan peneliti. Ini bisa jadi bahan ajar dan

menginspirasi penelitian lain yang mengeksplorasi topik-topik serupa, baik di tingkat lokal maupun nasional

d. Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari di kampus dalam konteks nyata, terutama yang berkaitan dengan inovasi dan kebijakan publik. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dan kritis mahasiswa dalam mengamati dan mengevaluasi program-program pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri mengenai strategi inovasi yang diterapkan oleh pemerintah.

2) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang dampak dari strategi pemerintah terhadap kesejahteraan mereka, sehingga akan mendorong masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan yang konstruktif.

b. Bagi Pemerintah

1) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang diterapkan dalam mencapai status Kabupaten Terinovatif.

2) Temuan yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas langkah-langkah yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat.

3) Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan program-program yang lebih inovatif dan berkelanjutan di masa mendatang.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan menyajikan data, analisis, dan temuan yang dapat digunakan sebagai referensi. Hasil penelitian ini dapat membuka peluang untuk studi lebih lanjut mengenai inovasi daerah, strategi pemerintah, dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian lanjutan dapat menginvestigasi aspek-aspek yang belum diteliti secara mendalam, serta membandingkan inovasi yang dilakukan oleh daerah lain, sehingga dapat menghasilkan wacana lebih luas dalam perkembangan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan di Indonesia.

E. Literatur Review

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan yang menjadi bahan telaah bagi peneliti.

1. Robinson, T. K., Kiayi, B., & Mambo, R. (2019) membahas strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan sektor pariwisata, serta perlunya peningkatan infrastruktur dan

promosi yang efektif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya mengeksplorasi strategi pemerintah, namun fokus Robinson et al. lebih kepada sektor spesifik, yaitu pariwisata, dibandingkan dengan inovasi secara umum di Kabupaten Wonogiri.

2. Lidia, Astuti Anggo (2021) penelitian mengenai strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) di Desa Gilangharjo menunjukkan bahwa sosialisasi dan penguatan kapasitas adalah langkah kunci dalam membangun kesadaran masyarakat. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat serta dukungan dari pemerintah desa, yang sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan anak sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus keduanya yang menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mendukung perlindungan anak. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analitis yang akan diambil oleh penulis, yang akan lebih mendalami aspek dampak sosial dan ekonomi dari strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh KKPA, serta mengeksplorasi pendekatan inovatif untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, seperti rendahnya respon dari masyarakat dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi kendala dalam implementasi program di lapangan.
3. Sari, R. (2021), penelitian tentang strategi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas harga kelapa di Kecamatan Batang Tuaka menekankan

pentingnya regulasi, penguatan kapasitas petani, dan diversifikasi produk sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan elemen-elemen kesejahteraan sosial menurut Midgley, namun tantangan seperti monopoli perdagangan dan penurunan produktivitas tetap menjadi penghambat. Penelitian ini sejalan dengan karya-karya sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang efektif perlu disertai dengan dukungan terhadap petani dan diversifikasi produk agar dapat mencapai hasil yang lebih signifikan. Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus keduanya untuk mengevaluasi dampak strategi pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan yang akan diambil penulis, yang akan lebih mendalamai aspek partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian mereka terhadap efektivitas strategi yang diterapkan.

4. Hidayat, T., Wijayanti, S., & Amrozi, Y. (2022, penelitian mengenai implementasi *E-government* di Kabupaten Bojonegoro menyoroti pentingnya evaluasi terhadap situs web pemerintah dengan fokus pada aspek transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, tampilan, dan pembaruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan layanan *e-government*, hasilnya belum maksimal, sejalan dengan kajian sebelumnya yang juga mencatat tantangan dalam penerapan *E-government* di berbagai daerah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada tujuan keduanya untuk mengevaluasi efektivitas

E-government dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang akan diambil penulis, yang tidak hanya fokus pada analisis web dan literatur, tetapi juga akan melibatkan wawancara dan survei dengan pengguna layanan *E-government*, dengan harapan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengguna dan dampak dari implementasi *E-government* di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penulis berharap untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi peningkatan layanan *E-government* di daerah tersebut.

5. Maria Avelina Kewa (2024) dalam kajian mengenai strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi objek wisata air panas yang berkelanjutan, penelitian ini merujuk pada pentingnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan sektor wisata. Berdasarkan penemuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam melakukan pengawasan dan masih terdapat kurangnya perawatan fasilitas. Persamaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokusnya yang sama, yaitu strategi pemerintah dalam pengembangan objek wisata serta pentingnya kolaborasi dengan masyarakat. Namun, perbedaannya terdapat pada pendekatan yang akan diambil penulis, yang tidak hanya menganalisis strategi yang sudah ada, tetapi juga berusaha untuk mengeksplorasi solusi inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang ada, serta memperdalam analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari pengembangan objek wisata..

6. Pratama, (2024) memfokuskan penelitian pada strategi pemerintah desa Dukuh dalam mengoptimalkan potensi ekonomi pariwisata. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku wisata lokal sangat berpengaruh. Fokus penelitian ini lebih mendalam pada aspek pariwisata, mirip dengan penelitian Robinson, termasuk kolaborasi dengan masyarakat.
7. Pande, P. S. M. A. (2025) menyelidiki strategi pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Desa Rama Murti. Metode yang digunakan adalah survei dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan administrasi yang baik. Meskipun fokus Pande terletak pada administrasi, ada kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pentingnya edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan strategi.
8. Nasripani, N., Hendrayani, H., & Malina, M. (2025) dalam penelitiannya membahas strategi Bappedalitbang dalam meningkatkan inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode yang digunakan mencakup analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara instansi pemerintah dan pelaku ekonomi sangat penting. Ini memiliki kesamaan dengan penelitian Wonogiri dalam hal fokus pada inovasi, di mana kolaborasi menjadi elemen sentral dalam strategi yang berhasil.
9. Sperling, K., & Arler, F. (2020) dalam artikel mereka berjudul "Local government innovation in the energy sector: A study of key actors' strategies and arguments," membahas peran pemerintah daerah dalam transisi menuju energi terbarukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kepada informan utama dalam konteks proyek-proyek energi, seperti ladang angin dan skema pendanaan untuk efisiensi energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi lokal sering kali dipicu oleh visi dan pengalaman sebelumnya, serta adanya keseimbangan antara argumen ekologis dan ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan proyek. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah pada sektor energi, terdapat kesamaan dengan penelitian tentang strategi pemerintah daerah dalam konteks inovasi, di mana pentingnya memanfaatkan sumber daya baik internal maupun eksternal diakui dalam mendukung proyek inovatif. Perbedaannya terletak pada sektor spesifik yang dibahas, di mana artikel Sperling dan Arler lebih berfokus pada energi terbarukan, sementara penelitian lainnya bisa mencakup berbagai sektor.

10. Vasstrøm, M., & Normann, R. (2019) dalam makalah "The role of local government in rural communities: culture-based development strategies" meneliti bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan strategi tata kelola untuk mengembangkan masyarakat pedesaan dengan melibatkan pelaku lokal dan sumber daya dari komunitas. Dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menggabungkan analisis terhadap tipologi peran tata kelola lokal dan hasil sosial ekonomi, penelitian ini mengungkap bahwa strategi yang diterapkan dapat bervariasi dan menciptakan hasil yang berbeda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konteks lokal dan budaya sangat penting dalam merumuskan strategi. Walaupun fokus Vasstrøm dan Normann terletak pada pembangunan berbasis budaya di masyarakat pedesaan, ada kesamaan dengan

penelitian inovasi dalam konteks bagaimana strategi dan keterlibatan masyarakat berkontribusi pada hasil sosial ekonomi. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pada budaya sebagai strategi utama dalam pengembangan sosial-ekonomi, dibandingkan dengan inovasi sebagai fokus utama di penelitian sebelumnya.

Kesimpulan dari tinjauan literatur di atas menggambarkan bahwa penelitian ini berfokus pada analisis SWOT untuk mengevaluasi strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai status sebagai Kabupaten Terinovatif, yang merupakan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Robinson et al. dan Lidia, Astuti Anggo, lebih mengedepankan aspek khusus seperti pariwisata dan pemberdayaan masyarakat tanpa menggunakan kerangka analisis SWOT, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pemerintah daerah secara komprehensif. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya menyoroti efektivitas kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana strategi inovatif dapat dirumuskan dan diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang lebih holistik dalam memahami dinamika pengembangan inovasi di tingkat daerah.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah: (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagianbagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara) negeri dimisalkan pengemudi negara, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR, jawaban dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; dan (5) negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) baik sekolah maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat (KBBI, 2023).

Pemerintahan merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan di suatu daerah atau negara. Menurut Indrawati dan Supriyani (2023), pemerintahan berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, teori tentang pemerintahan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mengoptimalkan hasil dari kebijakan yang diterapkan (Rahmandani & Putri,

2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga inovasi dalam layanan publik dapat diwujudkan.

Oleh karena itu, pemerintahan yang baik harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai landasan utama untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, pengelolaan pemerintahan yang berbasis partisipasi dan inovasi bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Inovasi

a. Pengertian Inovasi

Inovasi merupakan konsep yang krusial dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Menurut Nur Khalifah dkk. (2021), inovasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide-ide baru yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup pengembangan metode, teknik, dan alat pembelajaran yang lebih efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dengan lebih baik. Inovasi pendidikan tidak hanya berfokus pada hasilnya, tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan memperhatikan karakteristik dan dinamika pembelajaran yang terus berubah, inovasi menjadi sebuah keharusan bagi pendidik untuk tetap relevan dan efektif dalam memberikan layanan pendidikan.

Muhammad Kristiawan dkk. (2018) menegaskan bahwa inovasi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada pengembangan kurikulum atau materi ajar, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan. Inovasi dapat berupa penerapan teknologi digital, penggunaan media sosial sebagai alat pembelajaran, serta pengembangan program pelatihan yang relevan untuk guru. Selain itu, inovasi pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya, agar hasil yang dicapai dapat lebih signifikan dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, inovasi pendidikan merupakan yaitu respons terhadap tantangan zaman yang menuntut pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dari kedua sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu proses yang melibatkan penerapan ide-ide kreatif untuk meningkatkan praktik pendidikan. Inovasi tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga melibatkan perubahan pada proses dan sistem pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, inovasi pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik di era globalisasi saat ini.

b. Inovasi Pemerintah Daerah

1) Penerapan Inovasi Layanan Publik

Penerapan inovasi layanan publik merujuk pada pengenalan metode baru atau peningkatan teknologi dalam memberikan layanan

kepada masyarakat. Inovasi ini bisa meliputi penggunaan teknologi informasi, sistem pelayanan yang lebih efisien, dan desain layanan yang lebih ramah pengguna. Menurut Miao dan Wei (2020), penting bagi pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi. Dengan penerapan sistem *e-government*, misalnya, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2) Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik layanan yang diberikan oleh pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat. Kualitas ini mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan, keandalan, dan responsivitas dalam pelayanan. Farhani (2024) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan sangat bergantung pada pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja di sektor publik. Dengan memberikan pelatihan yang tepat kepada aparatur pemerintahan, diharapkan mereka dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan menjadi penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari setiap kebijakan publik. Pemerintah perlu merumuskan program yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga

mendorong peningkatan taraf hidup. Dimamesa dan Seran (2024) menunjukkan bahwa program-program inovatif yang ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penyediaan akses pendidikan yang lebih baik dan peningkatan layanan kesehatan akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

4) Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih tepat guna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nasripani et al. (2025) menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi dari kebijakan yang diambil, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di antara warga. Melalui forum-forum diskusi, survei, dan keterlibatan langsung dalam proyek-proyek pembangunan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah.

Menerapkan inovasi dalam layanan publik, menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat merupakan strategi penting yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan

yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Strategi Pemerintah

a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang terencana dan sistematis. Menurut David (2017), strategi adalah serangkaian keputusan yang menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dalam konteks pemerintahan, strategi merujuk pada kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi pemerintah ini melibatkan perencanaan yang memadukan sumber daya yang ada dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup warganya. Dalam lingkungan pemerintahan, strategi juga mencakup proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor privat, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya dihasilkan oleh pemerintah, tetapi juga berakar pada partisipasi masyarakat, inovasi, dan kolaborasi antar sektor. Adanya tata kelola yang baik akan memastikan bahwa strategi yang diambil dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah (Miao & Wei, 2020).

Secara keseluruhan, strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana sistematis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks pemerintahan, strategi mencakup serangkaian kebijakan dan tindakan yang mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian strategi ini menekankan bahwa keberhasilan suatu rencana tidak hanya bergantung pada perumusan yang baik, tetapi juga pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, kolaborasi, serta kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan responsif merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

b. Tahap Penyusunan Strategi

Penyusunan strategi pemerintah terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah analisis situasi, di mana pemerintah perlu memahami konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan serta tindakan yang akan diambil. Dalam tahap ini, analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sering kali digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi, serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal (Farhani, 2024).

Setelah melakukan analisis situasi, tahap kedua adalah perumusan tujuan. Dalam tahap ini, pemerintah perlu menentukan tujuan yang ingin dicapai, yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Proses ini harus melibatkan pemangku kepentingan agar tujuan yang ditetapkan

dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat (Dimamesa & Seran, 2024). Tahap terakhir adalah implementasi strategi, di mana rencana strategis yang telah disusun mulai diterapkan dalam bentuk kebijakan dan program. Pada tahap ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas dari strategi yang diterapkan. Pastikan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang sudah ada bila diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nasripani et al., 2025).

c. Strategi Pemerintah Daerah

1) Program Inovasi

Program inovasi merupakan inisiatif yang dirancang untuk menciptakan solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Inovasi dalam pemerintahan dapat mencakup penerapan teknologi baru, metode penyampaian layanan yang lebih baik, atau pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Miao dan Wei (2020), inovasi di tingkat lokal sangat penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang. Program inovasi yang sukses memerlukan visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan organisasi.

Salah satu penelitian dari Karuniyati, dk. (2021) menunjukkan bahwa strategi yang efektif harus melibatkan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kondisi sosial budaya di Desa Kuala Sempang mendukung pelaksanaan

program inovasi, ketahanan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan namun masih terhambat oleh keterbatasan keterampilan pengelola dan pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, strategi inovasi desa yang berhasil harus mencakup pelatihan dan pendampingan bagi pengelola serta edukasi masyarakat tentang potensi yang dapat dikembangkan, seperti objek wisata dan pengelolaan sumber daya pertanian. Meskipun strategi ini telah menunjukkan hasil yang positif, tantangan dalam sarana prasarana dan aksesibilitas lingkungan perlu diatasi agar kemandirian desa dapat terwujud secara optimal, menciptakan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2) Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan menangani isu-isu sosial, ekonomi, atau lingkungan. Kebijakan yang baik haruslah responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan yang ada. Farhani (2024) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan publik yang efektif melibatkan analisis menyeluruh terhadap konteks dan kondisi lokal, serta mempertimbangkan berbagai alternatif dan dampaknya. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah. Partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Dimamesa dan Seran (2024), partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program yang diterapkan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan harapan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat guna dan berdampak positif.

4) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk sektor privat, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat, adalah kunci untuk menciptakan inovasi dan menciptakan solusi yang lebih efektif. Menurut Nasripani et al. (2025), kolaborasi antar berbagai pihak dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Selain itu, pengembangan jaringan kemitraan dapat menciptakan sinergi yang mempercepat pelaksanaan kebijakan dan program inovatif.

5) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan strategi pemerintah. Pelatihan dan

pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil menjadi hal yang krusial agar mereka mampu menerapkan kebijakan dan program dengan baik. Menurut Arifin dan Rakhmawati (2020), investasi dalam pengembangan SDM akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi pemerintah. Selain itu, dengan meningkatkan kapasitas SDM, pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Strategi pemerintah yang efektif mencakup berbagai aspek, termasuk program inovasi, pembentukan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan memperhatikan semua elemen ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan mampu menjawab tantangan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan menggali pengalaman, pandangan, serta makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap suatu kejadian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menciptakan inovasi, sehingga aspek-aspek yang bernuansa subjektif dan kontekstual dapat diketahui dan dianalisis secara lebih detail. Penelitian ini juga

bertujuan untuk memahami dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam proses inovasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau referensi yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2022). Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam proses inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Data sekunder mencakup dokumen dan laporan yang relevan dengan strategi pemerintah, termasuk kebijakan dan program yang telah dirumuskan serta hasil evaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang strategi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset (Mukhtazar, 2020:45). Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses inovasi di Kabupaten Wonogiri. Informan tersebut mencakup:

- a. Kepala BAPPERIDA : Heru Utomo
- b. Sekretaris BAPPERIDA : Mursid Suroto
- c. Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi BAPPERIDA : Agus Supriyanto
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan BAPPERIDA: Fitri Pudtranti

- e. Penelaah Teknis Kebijakan BAPPERIDA : Suci Lestari
- f. Jf Pranata Komputer Pelaksana BAPPERIDA : Galuh Sulistyaning
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPERIDA : Sri Wahyuni
- h. Tokoh Masyarakat : Widodo
- i. Pihak swasta dan akademisi: Lilyk Eka Suranny

4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan harapan responden (Sugiyono, 2022). Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai strategi pemerintah dan dampaknya. Wawancara ini bersifat semi-struktural, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan.

b. Pengamatan

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku, kejadian, dan situasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diperoleh hanya dari wawancara (Sugiyono, 2022). Pengamatan dilakukan untuk memahami konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Peneliti dapat mengamati interaksi antara

pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian, seperti laporan, arsip, dan catatan. Teknik ini berguna untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan (Sugiyono, 2022). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan tahunan, kebijakan, dan rencana aksi yang relevan. Data dari dokumentasi ini akan membantu memperkuat temuan dari wawancara dan pengamatan

5. Teknik dan Prosedur Analisis

Teknik dan prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengolah informasi yang diperoleh dari lapangan. Proses ini terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap awal di mana peneliti mengidentifikasi, memilih, dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti perlu membuang informasi yang tidak penting atau tidak relevan, sehingga hanya menyisakan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan memperjelas informasi, serta memfokuskan

analisis pada elemen-elemen kunci yang akan diteliti lebih dalam. Dengan mengurangi data, peneliti juga dapat mengatur informasi secara efektif sehingga meningkatkan efisiensi dan alat analisis yang digunakan.

b. Penyajian Data

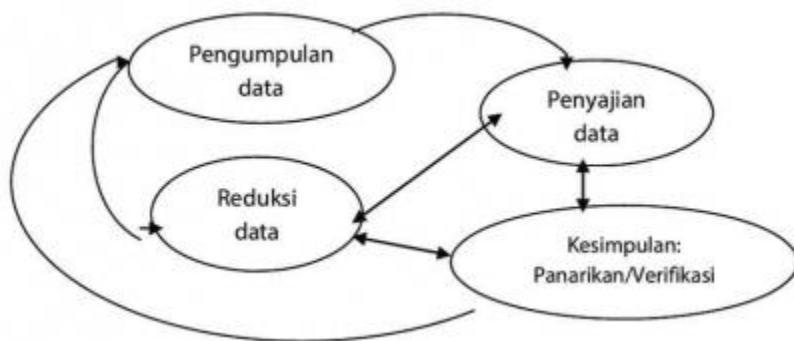
Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menyusun data ke dalam format yang mudah dipahami dan dianalisis, seperti tabel, grafik, atau narasi. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tren, dan hubungan antar variabel yang muncul dalam data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) menekankan bahwa penyajian data harus jelas dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami konteks penelitian dan informasi yang disajikan. Melalui penyajian data yang efektif, peneliti dapat menarik perhatian pada informasi penting yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk mentah.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis adalah penarikan kesimpulan yang berbasis bukti. Setelah data direduksi dan disajikan, peneliti mulai menafsirkan dan menganalisis informasi untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada data yang dianalisis sebelumnya dan harus mempertimbangkan validitas serta keandalan informasi yang diperoleh. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) mengakui bahwa penarikan kesimpulan sering kali merupakan proses berulang, di mana peneliti mungkin kembali melihat data untuk menjamin bahwa kesimpulan yang

diambil benar-benar mencerminkan temuan dari penelitian. Kesimpulan ini bukan hanya menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk praktik di lapangan.

Gambar 1 Alur Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber : Sugiyono (2019)

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Zuldafril (2012:89), keabsahan data adalah kesesuaian yang didasarkan pada konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) yang sesuai dengan versi penelitian kuantitatif, serta disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma yang berlaku. Untuk mencapai keabsahan data yang tepat, penting untuk menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satunya adalah melalui metode triangulasi.

Menurut Patton dalam Sugiyono (2019), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut sebagai cara untuk memverifikasi atau sebagai pembanding terhadap data penelitian. Dalam konteks ini, Patton dalam Sugiyono (2019) mengemukakan empat macam teknik triangulasi sebagai metode pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data, seperti arsip, dokumen, hasil observasi, dan hasil wawancara. Teknik ini juga mencakup melakukan wawancara dengan lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Melibatkan pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya, pembimbing dapat bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Menggunakan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah memenuhi syarat dan dapat dipercaya.

4. Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, contohnya metode wawancara dan metode observasi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data diterapkan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti dokumen kebijakan, hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, dan observasi langsung terhadap implementasi strategi inovasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menciptakan inovasi. Selain itu, triangulasi metode digunakan dengan

menggabungkan teknik wawancara dan observasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks sosial dan perilaku masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan. Dengan menerapkan kedua jenis triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih valid dan dapat diandalkan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas strategi inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri adalah kabupaten di Jawa Tengah. Secara geografis Wonogiri berlokasi di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, bagian selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian barat berbatasan dengan Gunung Kidul di Provinsi Yogyakarta, Bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Wonogiri. Luas kabupaten ini 1.822,37 km² dengan populasi 928.904 jiwa. Kabupaten Wonogiri terletak pada 7° 32' – 8° 15' Lintang selatan dan Garis Bujur 110° 41' – 111° 18' Bujur Timur. Secara administratif terbagi menjadi 25 Kecamatan, 43 Kelurahan dan 251 Desa. Kondisi alamnya sebagian besar berupa pegunungan berbatu gamping, terutama di bagian selatan, yang termasuk jajaran Pegunungan Seribu dan merupakan mata air dari Bengawan Solo.

B. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAPPERIDA, sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, memegang peranan sentral dan strategis dalam menggerakkan serta mengoordinasikan seluruh upaya inovasi di Kabupaten Wonogiri. Keterkaitannya dengan program inovasi tidak sekadar sebagai fasilitator, melainkan sebagai arsitek dan akselerator dari ekosistem inovasi daerah. Secara fundamental, BAPPERIDA

bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program-program inovasi yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonogiri.

Dalam struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Wonogiri, BAPPERIDA menempati posisi yang sangat strategis sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Posisi ini menegaskan bahwa BAPPERIDA bukanlah sekadar unit pelaksana, melainkan sebuah badan yang memiliki otoritas perencanaan dan pengawasan yang luas dalam lingkup pembangunan daerah, termasuk di dalamnya program inovasi. Bupati Wonogiri, sebagai kepala pemerintahan daerah, memiliki kewenangan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri. Dalam menjalankan mandat tersebut, Bupati mengandalkan BAPPERIDA sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan menjadi program-program konkret, termasuk program inovasi.

a. Sejarah BAPPERIDA

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Perda tersebut, BAPPEDA dan LITBANG masuk dalam kategori Typologi Type A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 3 tersebut di atas, sebagai dasar operasional BAPPEDA dan LITBANG, ditindaklanjuti dengan penetapan 3 (tiga) peraturan turunan, yaitu ;

- 1) Peraturan Bupati Wonogiri 73 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2016 tersebut Tugas BAPPEDA dan LITBANG adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan dan Jabatan Pengawas BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Wonogiri;
- 3) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Pada BAPPEDA dan LITBANG.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan bupati wonogiri nomor 52 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah, tugas dan fungsi bapperida kabupaten wonogiri adalah sebagai berikut :

TUGAS :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

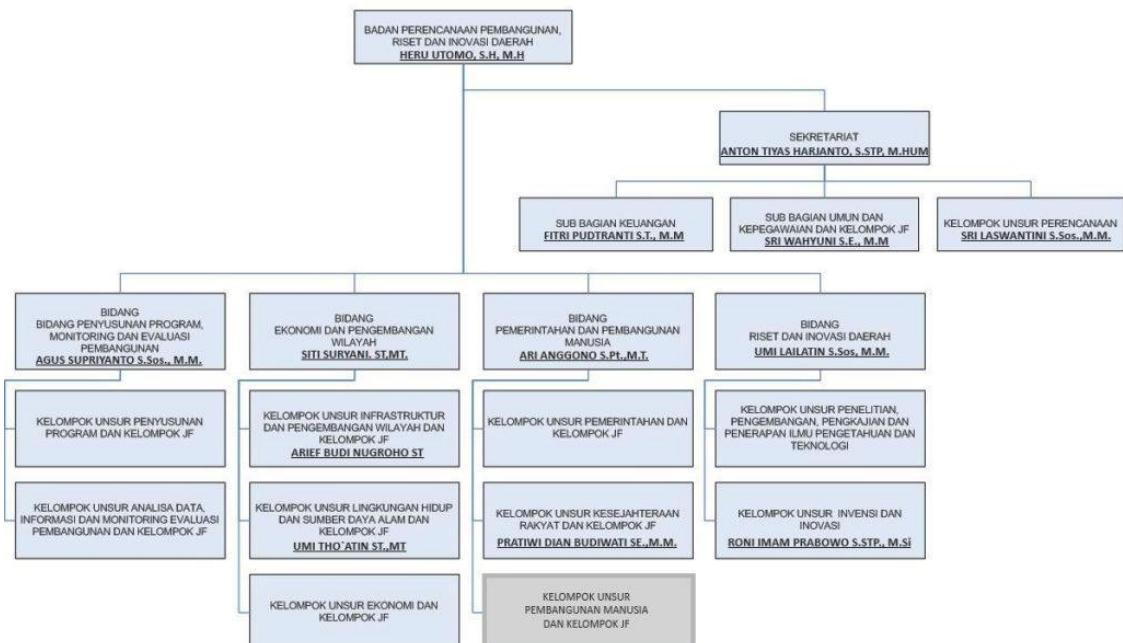
FUNGSI :

- 1) perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan bidang perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Gambar 2 Struktur Organisasi BAPPERIDA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



Tugas dan Tanggung jawab :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah :
Bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, serta pengawasan seluruh program di bidang pembangunan.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah :
Mengelola administrasi dan operasional badan, menyusun agenda dan korespondensi, serta mendukung kelancaran tugas sehari-hari kepala badan.
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Mengembangkan kebijakan riset dan inovasi, membina kerja sama riset, serta mengawasi pelaksanaan program riset di daerah.
4. Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan :
Menyusun rencana program pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang ada.
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah: Mengkaji dan merencanakan pengembangan ekonomi daerah, serta menyusun kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia : Bertugas dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemerintahan dan sumber daya manusia.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan: Mengelola anggaran dan keuangan badan, mempersiapkan laporan keuangan, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.

8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Mengelola administrasi umum, pengadaan barang dan jasa, serta urusan kepegawaian dalam lingkup badan.
9. Penelaah Teknis Kebijakan : Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan, memberikan rekomendasi teknis, serta memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
10. Pengelola Layanan Operasional : Mengelola operasional sehari-hari, menyediakan dukungan teknis dan logistik untuk kelancaran program yang dilaksanakan oleh badan.
11. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi: Mengelola sistem informasi dan teknologi yang mendukung operasional badan, termasuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data.
12. Jf Perencana Pertama : Membantu dalam penyusunan rencana dan program pembangunan, serta melakukan analisis terhadap data yang berkaitan dengan perencanaan.
13. Jf Pranata Komputer Pelaksana : Bertugas dalam implementasi dan dukungan teknis di bidang komputer dan teknologi informasi, termasuk dalam pengelolaan aplikasi dan sistem.
14. Jf Peneliti Muda: Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen berdasarkan hasil penelitian.

C. Inovasi-inovasi Kabupaten Wonogiri

Sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara konsisten menginisiasi dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan inovatif. Inovasi di Kabupaten Wonogiri mencakup spektrum yang luas, mulai dari reformasi tata kelola pemerintahan, pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan, hingga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui pendekatan-pendekatan baru. Pemahaman mendalam terhadap lanskap inovasi yang telah terbangun di Kabupaten Wonogiri menjadi krusial untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta potensi pengembangan lebih lanjut. Bagian ini akan menyajikan gambaran umum mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah dilaksanakan, yang menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Wonogiri

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|---|--|-------------|
| 1 | PROSES MANUFACTURE SPARE PART VARIASI SEPEDA MOTOR DENGAN PROGRAM AUTODESK FUSION 360 PADA MESIN CNC MILLING 3-AXIS | Otomotif, Manufaktur, Teknologi | 06 Nov 2021 |
| 2 | PEMANFAATAN KULIT TANAMAN LIDAH BUAYA SEBAGAI OBAT HERBAL ALTERNATIF UNTUK MENUNJANG KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA GUNA MENYONGSONG ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM BENTUK TEH | Kesehatan, Herbal, Industri 4.0, Produk Olahan | 10 Nov 2021 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|---|---|-------------|
| | CELUP KULIT LIDAH BUAYA "KULIYA" | | |
| 3 | PEMANFAATAN BUAH JAMBU MONYET SEBAGAI OBAT HERBAL ALTERNATIF UNTUK MENUNJANG KESEHATAN DALAM BENTUK KAPSUL JAMBU MONYET (JAMET) | Kesehatan, Herbal, Produk Olahan | 20 Nov 2021 |
| 4 | DOMBA APPS APLIKASI DONASI LIMBAH BERBASIS ANDROID YANG DIBUAT MENGGUNAKAN SAC (SMART APPS CREATOR) | Lingkungan, Teknologi, Aplikasi Mobile, Donasi | 24 Nov 2021 |
| 5 | MAJALAH DIGITAL EKSIS | Pendidikan, Literasi Digital, Media | 25 Nov 2021 |
| 6 | JOGO KONCO (INOVASI PENYADARAN BAHAYA COVID-19 DI RANAH REMAJA DAN MASYARAKAT SEKIAN MELALUI MEDIA GAMES) | Kesehatan (COVID-19), Edukasi, Teknologi (Games), Pemberdayaan Masyarakat | 25 Nov 2021 |
| 7 | SMATO SMART. STRATEGI INOVASI PENINGKATAN LITERASI SMA N 1 GIRIMARTO | Pendidikan, Literasi, Strategi | 27 Nov 2021 |
| 8 | GERAKAN MASYARAKAT PEDULI LAHAN KUMUH (GERMAS LILAHKU) | Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat, Penataan Lahan | 28 Nov 2021 |
| 9 | PARUTAN SERBAGUNA | Peralatan Rumah Tangga, Inovasi Produk | 23 Jul 2022 |
| 10 | BRAMGOPAN (BRAMBANG GORENG PANEKAN) | Produk Olahan Pangan, Ekonomi Lokal | 30 Aug 2022 |
| 11 | PAS (PORTABLE ASSISTIVE STICK) SEBAGAI ALAT BANTU UNTUK TUNANETRA DALAM MENGETAHUI NILAI MATA UANG, MEMILIH WARNA PAKAIAN, DAN | Teknologi Bantu, Disabilitas, Inovasi Produk | 19 May 2023 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|--|--|-------------|
| | MENGIDENTIFIKASI GELAP-TERANG SUATU RUANG | | |
| 12 | PERMEN HI-PROGUM | Kesehatan, Produk Olahan Pangan | 02 Apr 2024 |
| 13 | ECO PAVING BLOCK BERBAHAN DASAR PLASTIK | Lingkungan, Pengelolaan Limbah (Plastik), Material Bangunan | 13 May 2024 |
| 14 | ASI ESKA (ABSENSI SISWA ESDE KALIANCAR) | Pendidikan, Administrasi Sekolah, Teknologi Informasi | 23 Aug 2024 |
| 15 | BUTO ESKA (BUKU TAMU ELEKTRONIK SD NEGERI KALIANCAR) | Pendidikan, Administrasi Sekolah, Teknologi Informasi | 23 Aug 2024 |
| 16 | ABU ESKA (ADUAN BULLYING ESDE KALIANCAR) | Pendidikan, Pencegahan Bullying, Teknologi Informasi | 23 Aug 2024 |
| 17 | TAMAN DOLANAN LITERASI DAN NUMERASI | Pendidikan, Literasi, Numerasi, Permainan Edukatif | 26 Aug 2024 |
| 18 | BAKSO BAKAR MARTOLO (BAKTI SOSIAL BARENG-BARENG KARYAWAN SDN 2 JATIMARTO) | Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Nilai Toleransi | 27 Aug 2024 |
| 19 | PENGOLAHAN LIMBAH BUAH JAMBU METE MENJADI DODOL DAN SELAI JAMBU METE | Pengelolaan Limbah, Produk Olahan Pangan, Ekonomi Lokal | 04 Sep 2024 |
| 20 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BSB (BANK SAMPAH BERSERI) MENUJU DESA CERDAS | Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Cerdas | 07 Sep 2024 |
| 21 | KEBUN DAPUR PELENGKAP GIZI | Kesehatan, Gizi, Pertanian Perkotaan, Pencegahan Stunting | 12 Sep 2024 |
| 22 | APLIKASI PEMBAGI KELOMPOK ACAK | Teknologi Informasi, Aplikasi Mobile, Pendidikan/Organisasi | 12 Sep 2024 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|--|--|-------------|
| 23 | RUMAH DARLING BERSERI | Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Layanan Digital | 16 Sep 2024 |
| 24 | GEMBOSI (GETHUK MBOTHE VARIASI) SEBAGAI ALTERNATIF SNACK DARI WONOGIRI | Produk Olahan Pangan, Ekonomi Lokal, Kuliner Khas | 17 Sep 2024 |
| 25 | SELEROS SEBAGAI ALTERNATIF MINUMAN HERBAL | Kesehatan, Herbal, Produk Olahan Minuman | 17 Sep 2024 |
| 26 | TONER ROSALOEV SEBAGAI SKINCARE ALTERNATIF | Kesehatan, Kecantikan, Produk Olahan Alami | 17 Sep 2024 |
| 27 | SANGO PILIHAN TEPAT UNTUK CAMILAN SEHAT | Kesehatan, Produk Olahan Pangan, Gaya Hidup Sehat | 17 Sep 2024 |
| 28 | LAPIS LEGIT (PENGGALIAN POTENSI SISWA MELALUI LITERASI DIGITAL) | Pendidikan, Literasi Digital, Pengembangan Potensi Siswa | 17 Sep 2024 |
| 29 | NUSA PENTING (NUGGET SAYUR PENCEGAH STUNTING) | Kesehatan, Gizi, Produk Olahan Pangan, Pencegahan Stunting | 23 Sep 2024 |
| 30 | PRACI LOCAL SPACE, SEBUAH RUANG KREATIF UNTUK MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI PRACIMANTORO | Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan Masyarakat, Ruang Kolaborasi | 25 Sep 2024 |
| 31 | LABORATORIUM VIRTUAL GEJALA LISTRIK STATIS | Pendidikan, Sains, Teknologi, Pembelajaran Virtual | 26 Sep 2024 |
| 32 | SUWEQ CRUNCH | Produk Olahan Pangan, Ekonomi Lokal | 26 Sep 2024 |
| 33 | MIMOSA (GEL PUTRI MALU PENGHILANG LUKA BAKAR) | Kesehatan, Herbal, Produk Olahan | 26 Sep 2024 |
| 34 | PAYALINER | (Bidang tidak spesifik dari deskripsi singkat) | 26 Sep 2024 |
| 35 | PIPER CLEAN | Kebersihan, Produk Rumah Tangga, Inovasi Produk | 26 Sep 2024 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|--|---|-------------|
| 36 | MUDA FEED PAKAN TERNAK, SOLUSI KRISIS PAKAN DI MUSIM KEMARAU | Pertanian, Peternakan, Solusi Krisis Pakan | 27 Sep 2024 |
| 37 | KOMIK DIGITAL "BULLYING TIDAK MEMBUATMU KEREN" | Pendidikan, Pencegahan Bullying, Media Digital | 27 Sep 2024 |
| 38 | SABUN DAN SHAMPO CAIR DARI SEKAM PADI (GLANZ) | Produk Olahan, Pemanfaatan Limbah (Sekam Padi), Produk Ramah Lingkungan | 27 Sep 2024 |
| 39 | HAKEN SEBAGAI INOVASI PEMANFAATAN DAUN KEMANGI MENJADI PEMBERSIH TANGAN ALAMI | Kesehatan, Kebersihan, Produk Alami, Pemanfaatan Tanaman | 27 Sep 2024 |
| 40 | DAYLIWASH | (Bidang tidak spesifik dari deskripsi singkat) | 28 Sep 2024 |
| 41 | PELLICIDENT HERBAL | Kesehatan, Herbal, Produk Perawatan | 28 Sep 2024 |
| 42 | BERAS ANALOG BERBAHAN TALAS BENENG | Produk Olahan Pangan, Ketahanan Pangan, Pemanfaatan Tanaman Lokal | 29 Sep 2024 |
| 43 | SI HARIS (APLIKASI KEHADIRAN SISWA) DAN SI ABSIS (APLIKASI ABSENSI SISWA) SDN 1 GEMAWANG | Pendidikan, Administrasi Sekolah, Teknologi Informasi | 29 Sep 2024 |
| 44 | PEMBUATAN PUPUK ORGANIK KENSHIRO DARI LIMBAH IKAN | Lingkungan, Pengelolaan Limbah (Limbah Ikan), Pertanian, Pupuk Organik | 29 Sep 2024 |
| 45 | OCICARE | (Bidang tidak spesifik dari deskripsi singkat) | 29 Sep 2024 |
| 46 | NUGGET SEHAT GANIL KEKO | Kesehatan, Produk Olahan Pangan, Makanan Sehat | 29 Sep 2024 |
| 47 | MALINI : PEMANFAATAN MINYAK JELANTAH SEBAGAI BAHAN UTAMA | Lingkungan, Pengelolaan Limbah (Minyak) | 30 Sep 2024 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|---|---|-------------|
| | PEMBUATAN LILIN AROMATERAPI LAVENDER MENJADI INOVASI PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK JELANTAH DI SMAN 1 SLOGOHIMO | Jelantah), Produk Kreatif, Aromaterapi | |
| 48 | PANGAMATAN KEUNGGULAN PENGGUNAAN PPK (PRODUK PUPUK KOMPOS) DAN ECO-ENZYME PADA MEDIA TANAM UNTUK PERTUMBUHAN BAWANG MERAH (ALLIUM CEPA) DI SMA PANGUDI LUHUR ST. VINCENTIUS GIRIWOYO TAHUN 2024 | Pertanian, Pupuk Organik, Pertanian Berkelanjutan | 30 Sep 2024 |
| 49 | INOVASI OLAHAN KORO PEDANG MENJADI PRODUK PANGAN SEHAT UNTUK KETAHANAN PANGAN NASIONAL | Produk Olahan Pangan, Ketahanan Pangan, Pemanfaatan Tanaman Lokal | 30 Sep 2024 |
| 50 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI CNC DALAM INOVASI AKSESORIS DAN PART KENDARAAN DI TEFA SMKS PANCASILA 1 WONOGIRI | Otomotif, Manufaktur, Teknologi, Pendidikan Vokasi | 02 Okt 2024 |
| 51 | MEMBEDAH TRADISI BERSIH DESA (DADHISISA) | Budaya, Tradisi, Kearifan Lokal | 03 Okt 2024 |
| 52 | GERAKAN PENGHIJAUAN MENANGKAL PEMANASAN GLOBAL (GLOBAL WARMING) | Lingkungan, Perubahan Iklim, Gerakan Penghijauan | 04 Okt 2024 |
| 53 | EVALUASI PEMAHAMAN SISWA SMP TENTANG PERUBAHAN IKLIM | Pendidikan, Lingkungan, Perubahan Iklim | 04 Okt 2024 |
| 54 | ANALISIS KOMPOSISI LIMBAH MAKANAN DI KANTIN SEKOLAH | Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pendidikan | 04 Okt 2024 |
| 55 | ANALISIS PERAN SEKOLAH DALAM MEMBENTUK | Pendidikan, Sosial, Keterlibatan Masyarakat | 04 Okt 2024 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|---|---|-------------|
| | KESADARAN SOSIAL DAN KETERLIBATAN SISWA DALAM KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT | | |
| 56 | DAMPAK LIMBAH ELEKTRONIK TERHADAP LINGKUNGAN SEKOLAH | Lingkungan, Pengelolaan Limbah (Elektronik), Teknologi | 04 Okt 2024 |
| 57 | PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR SISWA DIKELAS | Pendidikan, Lingkungan Belajar, Psikologi | 04 Okt 2024 |
| 58 | PENGARUH POLA TANAM TERHADAP KUALITAS TANAH DI SEKOLAH | Pertanian, Lingkungan, Pendidikan | 04 Okt 2024 |
| 59 | STUDI PENGELOLAHAN SAMPAH PLASTIK DILINGKUNGAN SEKOLAH | Lingkungan, Pengelolaan Sampah (Plastik), Pendidikan | 04 Okt 2024 |
| 60 | IDENTIFIKASI JENIS-JENIS TANAMAN ENDEMIK DI SEKITAR SMP | Lingkungan, Konservasi, Pendidikan | 04 Okt 2024 |
| 61 | PERAN SISWA DALAM PENGHIJAUAN LINGKUNGAN SEKOLAH | Lingkungan, Pendidikan, Pemberdayaan Siswa | 04 Okt 2024 |
| 62 | STUDI TENTANG PERAN SISWA SMP DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KREATIFITAS SOSIAL | Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial | 04 Okt 2024 |
| 63 | DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP IDENTITAS BUDAYA SISWA SMP | Pendidikan, Sosial Budaya, Globalisasi | 04 Okt 2024 |
| 64 | PENGOLAHAN TANAMAN LIDAH BUAYA MENJADI MINUMAN NATA DE ALOE VERA UNTUK MENJADI IDE PELUANG USAHA YANG ADA DI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI | Produk Olahan Pangan, Pemanfaatan Tanaman, Peluang Usaha, Ekonomi Lokal | 12 Okt 2024 |
| 65 | KONVERSI PERAHU BERMESIN BENSIN KE | Energi Terbarukan, Kelautan, Teknologi | 20 Okt 2024 |

| NO | NAMA INOVASI | FOKUS BIDANG | TAHUN |
|----|---|--|-------|
| | MESIN LISTRIK BERBASIS PANEL SURYA | | |
| 66 | PEMANFAATAN DAUN SIRIH MERAH (PIPER CROCatum) DAN TAWAS SEBAGAI BAHAN ALAMI MEMBUAT DEODORANT SPRAY | Kesehatan, Produk Alami, Kebersihan | 2024 |
| 67 | CINTA MUTIARA KELUARGA (CMK) | Kesehatan, Teknologi Digital, Pencegahan Stunting, Aplikasi Mobile | 2024 |
| 68 | MITRA DESA | Ekonomi Lokal, Pemberdayaan UMKM, Fasilitasi Perizinan, Pelayanan Publik | 2024 |

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Kekuatan

1) Komitmen kepemimpinan yang kuat

Kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen terhadap inovasi merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi strategi inovasi daerah. Tanpa dukungan penuh dari pimpinan tertinggi, program-program inovasi akan menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Komitmen kepemimpinan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dukungan moral, tetapi juga dalam alokasi sumber daya, pemberian kewenangan, dan penciptaan iklim organisasi yang kondusif untuk berinovasi.

Hasil wawancara menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dalam mendorong inovasi:

"Bupati kami sangat mendukung setiap upaya inovasi. Beliau selalu menekankan bahwa inovasi bukan pilihan tapi keharusan. Setiap rapat koordinasi, inovasi selalu menjadi agenda utama." (Mursid Suroto, Sekretaris BAPPERIDA)

Pernyataan tersebut mencerminkan transformasi paradigma kepemimpinan dari yang semula bersifat konvensional menuju kepemimpinan yang transformatif dan berorientasi inovasi. Penekanan bahwa "inovasi bukan pilihan tapi keharusan" menunjukkan pemahaman yang

mendalam tentang urgensi inovasi dalam konteks persaingan antar daerah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Konsistensi dalam menjadikan inovasi sebagai agenda utama dalam setiap rapat koordinasi menunjukkan bahwa komitmen tersebut bukan hanya retorika, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem manajemen pemerintahan. Hal ini sejalan dengan teori David (2017) yang menekankan bahwa strategi yang efektif memerlukan dukungan penuh dari pimpinan organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Menelusuri jejak komitmen kepemimpinan terhadap inovasi di Kabupaten Wonogiri melalui lensa dokumentasi, dapat disaksikan sebuah narasi evolusi kebijakan yang terstruktur. Dokumen-dokumen resmi yang peneliti kumpulkan menceritakan bagaimana visi kepemimpinan mulai diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret. Dimulai dari terbitnya berbagai Surat Keputusan (SK) yang mengukuhkan pembentukan tim atau gugus tugas inovasi di berbagai lini pemerintahan, hingga terbitnya Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur tentang percepatan inovasi daerah, setiap lembar dokumen tersebut adalah bukti nyata dari upaya sistematis.

Berdasarkan triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa komitmen kepemimpinan yang kuat di Kabupaten Wonogiri telah terbukti secara konsisten. Data wawancara dengan berbagai level jabatan menunjukkan pandangan seragam tentang dukungan penuh Bupati terhadap inovasi, observasi langsung mengkonfirmasi bahwa inovasi selalu menjadi agenda prioritas dalam rapat koordinasi rutin,

sementara dokumentasi berupa SK dan alokasi anggaran membuktikan adanya komitmen formal yang mendukung pengembangan inovasi. Konvergensi ketiga sumber data ini memperkuat validitas bahwa komitmen kepemimpinan bukan sekadar retorika, melainkan telah diwujudkan dalam kebijakan konkret dan budaya organisasi yang kondusif untuk inovasi.

2) Pengalaman dan *Track Record* yang Baik

Pengalaman sukses dalam bidang inovasi merupakan aset berharga yang dapat menjadi modal untuk pengembangan inovasi yang lebih maju di masa depan. *Track record* yang baik tidak hanya memberikan kredibilitas, tetapi juga pengalaman belajar yang berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kabupaten Wonogiri telah membuktikan konsistensinya dalam bidang inovasi melalui pencapaian sebagai Kabupaten Terinovatif selama lima tahun berturut-turut.

Pencapaian berturut-turut sebagai Kabupaten Terinovatif menjadi modal penting:

"Prestasi selama 5 tahun berturut-turut ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa sistem dan strategi kita sudah tepat. Pengalaman ini menjadi bekal untuk terus berinovasi lebih baik lagi." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Konsistensi pencapaian selama lima tahun berturut-turut ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri tidak hanya mampu mengembangkan inovasi sekali waktu, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mempertahankan inovasi. Hal ini mengindikasikan adanya system dan proses yang telah terinstitusionalisasi dengan baik, sehingga tidak bergantung pada system atau momentum tertentu. Pengakuan bahwa "sistem dan strategi sudah

“tepat” menunjukkan adanya proses evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Pengalaman ini menjadi competitive advantage yang sulit ditiru oleh daerah lain karena merupakan hasil dari proses pembelajaran dan adaptasi yang panjang.

Dokumentasi yang peneliti himpun memaparkan sebuah kisah luar biasa tentang konsistensi dan daya tahan. Sertifikat penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif selama lima tahun berturut-turut, yang terpampang nyata, bukan sekadar selembar kertas, melainkan saksi bisu dari dedikasi dan ketekunan. Ditambah lagi dengan adanya laporan evaluasi tahunan yang merinci keberhasilan program-program inovatif di setiap sektor, serta dokumentasi *best practices* yang terdokumentasi rapi, semua ini membangun sebuah gambaran yang utuh. Ini adalah bukti bahwa inovasi di Wonogiri bukanlah sekadar lonjakan sesaat, melainkan hasil dari sebuah sistem yang matang, pembelajaran yang berkelanjutan, dan akumulasi pengalaman berharga yang telah teruji waktu. Dengan demikian, *track record* yang solid ini menjadi fondasi kokoh yang sulit ditandingi, sebuah aset berharga yang kini menjadi kekuatan utama Kabupaten Wonogiri dalam menatap masa depan inovasi.

Berdasarkan triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa pengalaman dan *track record* yang baik telah menjadi kekuatan utama Kabupaten Wonogiri. Data wawancara dengan informan kunci mengkonfirmasi bahwa prestasi lima tahun berturut-turut sebagai Kabupaten Terinovatif bukan kebetulan melainkan hasil dari sistem

yang teruji, observasi terhadap proses kerja menunjukkan adanya institutional memory dan pembelajaran berkelanjutan dari pengalaman sebelumnya, sementara dokumentasi berupa sertifikat penghargaan, laporan evaluasi tahunan, dan *best practices* yang terdokumentasi membuktikan konsistensi kinerja inovasi. Konvergensi ketiga sumber data ini menegaskan bahwa track record yang solid telah menjadi competitive advantage yang sulit ditiru karena merupakan hasil akumulasi pembelajaran dan adaptasi organisasi selama bertahun-tahun.

3) Sistem Koordinasi yang Solid

Koordinasi yang efektif antar unit organisasi merupakan prasyarat penting dalam implementasi strategi inovasi yang melibatkan berbagai stakeholder dan lintas sektoral. Sistem koordinasi yang baik memungkinkan sinergi antar unit kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan minimalisasi konflik kepentingan. Dalam konteks inovasi daerah, koordinasi menjadi semakin penting karena seringkali melibatkan multiple stakeholders dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda.

Mekanisme koordinasi antar OPD telah berjalan dengan baik:

"Kami punya sistem koordinasi yang rutin. Setiap bulan ada rapat koordinasi inovasi yang melibatkan semua OPD. Komunikasi antar bidang juga lancar, tidak ada ego sektoral." (Agus Supriyanto, Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi)

Sistem koordinasi rutin bulanan yang melibatkan semua OPD menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan sinkronisasi antar unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak dipandang sebagai tanggung jawab satu OPD saja, tetapi sebagai agenda

bersama yang memerlukan kontribusi dari semua pihak. Tidak adanya "ego sektoral" menunjukkan budaya organisasi yang matang di mana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan sektoral. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi dan inovasi lintas sektoral, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan solusi-solusi yang komprehensif dan terintegrasi.

Pernyataan dari Kepala BAPPERIDA yang menyebutkan adanya rapat koordinasi inovasi bulanan yang melibatkan semua OPD, serta komunikasi antar bidang yang lancar tanpa ego sektoral, diperkuat oleh observasi langsung terhadap pelaksanaan rapat yang mengkonfirmasi efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan yang kolaboratif. Gambaran dari proses kerja ini, yang didukung oleh bukti-bukti dari alur komunikasi dan tindak lanjut yang terorganisir, melukiskan sebuah gambaran utuh. Ini adalah kisah tentang bagaimana kolaborasi lintas sektoral berjalan efektif, di mana ide-ide inovatif tidak tersesat dalam birokrasi, melainkan mengalir lancar dan ditindaklanjuti dengan sinergi. Dengan demikian, sistem koordinasi yang solid ini menjadi salah satu pilar kekuatan Kabupaten Wonogiri, memastikan bahwa upaya inovasi dapat berkembang secara komprehensif dan terintegrasi.

Melalui analisis triangulasi data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengidentifikasi bahwa sistem koordinasi yang solid telah menjadi salah satu pilar kekuatan Kabupaten Wonogiri. Data wawancara menunjukkan adanya mekanisme koordinasi rutin bulanan yang melibatkan seluruh OPD dengan komunikasi yang lancar tanpa ego sektoral,

observasi langsung terhadap pelaksanaan rapat koordinasi mengkonfirmasi efektivitas komunikasi antar bidang dan pengambilan keputusan yang kolaboratif, sedangkan dokumentasi berupa notulen rapat, jadwal koordinasi, dan laporan tindak lanjut membuktikan sistematis dan terstrukturnya proses koordinasi.

b. Kelemahan

1) Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan tantangan klasik yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah dalam mengembangkan program inovasi. Anggaran yang terbatas tidak hanya membatasi scope dan scale dari program inovasi, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan sustainability dari inovasi yang dikembangkan. Namun, keterbatasan anggaran juga dapat mendorong kreativitas dalam mencari solusi alternatif dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran:

"Jujur, anggaran untuk riset dan inovasi masih terbatas. Kami harus kreatif mengoptimalkan anggaran yang ada. Kadang harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengatasi keterbatasan dana." (Fitri Pudtranti, Kepala Sub Bagian Keuangan)

Keterbukaan dalam mengakui keterbatasan anggaran menunjukkan sikap realistik dan transparan dalam mengelola sumber daya. Penting untuk dicatat bahwa respons terhadap keterbatasan ini bukan dengan menyerah, tetapi dengan mencari solusi kreatif melalui optimalisasi anggaran dan kolaborasi dengan pihak lain. Strategi kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan dana menunjukkan pemahaman tentang pentingnya

partnership dalam pengembangan inovasi. Hal ini sejalan dengan konsep *resource-based view* yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya berasal dari sumber daya internal, tetapi juga dari kemampuan mengakses dan memanfaatkan sumber daya eksternal melalui kemitraan strategis.

Menelaah aspek finansial dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diuraikan pada Bab I mengenai tantangan klasik keterbatasan anggaran, temuan peneliti mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya finansial merupakan kendala yang dihadapi. Pengakuan terhadap keterbatasan anggaran riset dan inovasi, sebagaimana disampaikan oleh pengelola keuangan, menunjukkan adanya pemahaman realistik terhadap kondisi fiskal daerah. Lebih lanjut, observasi terhadap proses perencanaan anggaran mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk mengoptimalkan alokasi dana yang tersedia. Meskipun proporsi anggaran inovasi dalam APBD mungkin relatif terbatas, hal tersebut tidak serta merta menghambat proses inovasi. Sebaliknya, temuan menunjukkan bahwa keterbatasan ini mendorong pengembangan strategi alternatif, termasuk kolaborasi dan kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Pendekatan ini memungkinkan akses terhadap sumber daya tambahan dan memperluas cakupan serta keberlanjutan program inovasi.

Hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan kelemahan nyata yang dihadapi Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan inovasi. Data

wawancara dengan pengelola keuangan mengungkapkan keterbukaan dan transparansi dalam mengakui keterbatasan anggaran riset dan inovasi, observasi terhadap proses perencanaan anggaran menunjukkan upaya kreatif dalam mengoptimalkan alokasi dana yang terbatas, sementara dokumentasi berupa APBD dan laporan realisasi anggaran mengkonfirmasi proporsi anggaran inovasi yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan. Namun, ketiga sumber data juga secara konsisten menunjukkan bahwa keterbatasan ini tidak menjadi penghambat fatal, melainkan mendorong kreativitas melalui strategi kolaborasi dan kemitraan strategis dengan pihak eksternal untuk mengakses sumber daya tambahan dalam pengembangan inovasi.

2) Kesenjangan kemampuan SDM

Dalam era digital yang berkembang pesat, kesenjangan kemampuan teknologi di antara SDM merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh organisasi publik. Gap ini tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis, tetapi juga dengan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi yang cepat. Kesenjangan ini dapat menghambat implementasi inovasi digital dan mengurangi efektivitas program-program yang dikembangkan.

Meskipun memiliki SDM yang berpengalaman, masih ada kesenjangan kemampuan teknologi:

"Tidak semua pegawai familiar dengan teknologi terbaru. Masih ada yang perlu pendampingan ekstra ketika menggunakan aplikasi baru. Ini tantangan yang harus terus kami atasi melalui pelatihan." (Suci Lestari, Penelaah Teknis Kebijakan)

Pengakuan tentang adanya kesenjangan kemampuan teknologi menunjukkan kesadaran organisasi tentang pentingnya continuous learning dalam era digital. Kebutuhan pendampingan ekstra bagi sebagian pegawai menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pengembangan sumber daya manusia. Komitmen untuk mengatasi tantangan ini melalui pelatihan menunjukkan pendekatan yang proaktif dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini sejalan dengan teori Farhani (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan sangat bergantung pada pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja di sektor publik.

Dalam perjalanan Kabupaten Wonogiri mengadaptasi diri dengan tuntutan era digital, terungkap sebuah narasi tentang bagaimana kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. Pernyataan dari Penelaah Teknis Kebijakan yang mengakui bahwa "tidak semua pegawai familiar dengan teknologi terbaru" dan masih memerlukan "pendampingan ekstra", diperkuat oleh observasi terhadap proses kerja yang menunjukkan variasi tingkat penguasaan teknologi di antara pegawai. Bayangkan, di tengah upaya pemerintah daerah untuk mengadopsi berbagai aplikasi baru, terdapat sebagian pegawai yang membutuhkan bimbingan lebih intensif untuk memanfaatkannya secara optimal. Namun, kisah ini tidak berhenti pada pengakuan tantangan, melainkan berlanjut pada upaya proaktif. Temuan peneliti juga mencatat adanya program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, yang terlihat dari daftar hadir pelatihan dan evaluasi

kompetensi. Ini adalah bukti nyata bahwa Kabupaten Wonogiri menyadari pentingnya *continuous learning* dan berinvestasi dalam peningkatan kompetensi pegawainya, meskipun kesenjangan ini tetap menjadi area yang memerlukan perhatian dan strategi pengembangan SDM yang lebih intensif di masa depan.

Temuan dari triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi mengkonfirmasi bahwa kesenjangan kemampuan SDM dalam bidang teknologi menjadi kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Wonogiri. Data wawancara dengan berbagai informan mengungkapkan pengakuan jujur tentang adanya pegawai yang masih memerlukan pendampingan ekstra dalam menggunakan aplikasi teknologi terbaru, observasi langsung terhadap proses kerja menunjukkan variasi tingkat kemampuan teknologi di antara pegawai dengan beberapa yang masih memerlukan bantuan teknis, sedangkan dokumentasi berupa daftar hadir pelatihan dan evaluasi kompetensi membuktikan upaya berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan melalui program pengembangan kapasitas. Ketiga sumber data ini secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun kesadaran organisasi tentang pentingnya *continuous learning* sudah ada dan upaya pelatihan terus dilakukan, kesenjangan kemampuan teknologi masih menjadi tantangan yang memerlukan strategi pengembangan SDM yang lebih intensif dan berkelanjutan.

3) Infrastruktur TI yang Belum Merata

Ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antara kawasan perkotaan dan pedesaan merupakan tantangan yang umum dihadapi dalam implementasi inovasi digital di tingkat daerah. Ketimpangan ini dapat menciptakan *digital divide* yang menghambat pemerataan akses terhadap layanan digital dan mengurangi efektivitas program inovasi, terutama yang berbasis teknologi.

Meskipun ada kemajuan, infrastruktur TI belum merata di seluruh wilayah:

"Koneksi internet di beberapa desa terpencil masih belum optimal. Ini mempengaruhi implementasi aplikasi digital seperti CMK di lapangan." (Galuh Sulistyaning, Jf Pranata Komputer Pelaksana)

Ketidakmerataan koneksi internet di desa terpencil menunjukkan tantangan geografis dan ekonomi dalam pengembangan infrastruktur TI. Dampak langsung terhadap implementasi aplikasi seperti CMK menunjukkan bahwa infrastruktur bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mempengaruhi efektivitas program dan kualitas layanan publik. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk mengatasi digital divide dan memastikan bahwa inovasi digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, tidak hanya yang berada di kawasan perkotaan atau terjangkau infrastruktur.

Melalui triangulasi data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengidentifikasi bahwa ketidakmerataan infrastruktur TI menjadi kelemahan signifikan yang menghambat implementasi inovasi digital di Kabupaten Wonogiri. Data wawancara dengan Jf Pranata Komputer

Pelaksana mengungkapkan secara transparan bahwa koneksi internet di beberapa desa terpencil masih belum optimal dan berdampak langsung pada efektivitas aplikasi seperti CMK, observasi lapangan menunjukkan adanya variasi kualitas sinyal dan kecepatan internet yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan dengan beberapa desa yang masih mengalami gangguan konektivitas, sementara dokumentasi berupa peta sebaran jaringan dan laporan keluhan masyarakat membuktikan kesenjangan digital yang nyata dalam akses infrastruktur.

c. Peluang

1) Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong inovasi daerah menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan inovasi di tingkat lokal. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk regulasi yang memberikan payung hukum, tetapi juga dukungan teknis dan finansial yang dapat dimanfaatkan daerah untuk mengembangkan program-program inovatif. Regulasi seperti PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan *framework* yang jelas bagi daerah untuk mengembangkan inovasi.

Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong inovasi daerah membuka peluang besar:

"Regulasi tentang inovasi daerah dari Kemendagri memberikan payung hukum yang kuat. Kita juga mendapat dukungan teknis dan pendanaan dari pusat untuk program-program inovatif." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Payung hukum yang kuat dari regulasi inovasi daerah memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi daerah untuk mengembangkan berbagai bentuk inovasi. Hal ini mengurangi risiko hukum dan memberikan *confidence* kepada aparatur daerah untuk berani berinovasi. Dukungan teknis dari pusat memberikan akses kepada *expertise* dan *best practices* dari daerah lain, sementara dukungan pendanaan membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Kombinasi antara payung hukum, dukungan teknis, dan pendanaan ini menciptakan ekosistem yang ideal untuk pengembangan inovasi daerah.

Hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi mengkonfirmasi bahwa dukungan kebijakan pemerintah pusat merupakan peluang strategis yang telah dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten Wonogiri. Data wawancara dengan Kepala BAPPERIDA mengungkapkan apresiasi terhadap regulasi inovasi daerah dari Kemendagri yang memberikan payung hukum kuat serta dukungan teknis dan pendanaan untuk program inovatif, observasi terhadap proses perencanaan dan implementasi program menunjukkan adanya rujukan konsisten terhadap framework regulasi pusat dan pemanfaatan bantuan teknis dalam pengembangan aplikasi, sementara dokumentasi berupa surat keputusan, proposal yang disetujui pusat, dan laporan penggunaan dana bantuan membuktikan pemanfaatan aktif dukungan pemerintah pusat. Ketiga sumber data ini secara konsisten menunjukkan bahwa kombinasi antara payung hukum yang jelas, akses terhadap *expertise* dan *best practices*, serta

dukungan finansial telah menciptakan ekosistem yang ideal untuk pengembangan inovasi daerah, memberikan confidence kepada aparatur untuk berani berinovasi tanpa khawatir dengan risiko hukum.

2) Perkembangan Teknologi Digital

Revolusi teknologi digital membuka peluang tak terbatas untuk mengembangkan inovasi yang lebih canggih dan efektif. Teknologi-teknologi emerging seperti kecerdasan buatan, analitik data besar, *Internet of Things*, dan *cloud computing* memberikan tools yang powerful untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Perkembangan ini juga menurunkan *cost of innovation* karena banyak teknologi yang menjadi lebih accessible dan affordable.

Kemajuan teknologi digital membuka peluang untuk inovasi yang lebih canggih:

"Era digital ini memberikan peluang tak terbatas. Dengan AI, big data, dan IoT, kita bisa mengembangkan aplikasi yang lebih pintar dan efisien." (Lilyk Eka Suranny, Peneliti Muda)

Pengakuan tentang peluang tak terbatas di era digital menunjukkan mindset yang forward-looking dan optimis terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat dikembangkan. Penyebutan teknologi-teknologi spesifik seperti AI, big data, dan IoT menunjukkan pemahaman yang up-to-date tentang trend teknologi terkini. Visi untuk mengembangkan aplikasi yang "lebih pintar dan efisien" menunjukkan orientasi terhadap quality improvement dan user experience enhancement. Hal ini sejalan dengan teori Miao dan Wei (2020) yang menekankan pentingnya pemerintah

mengadopsi teknologi baru untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa "Era digital ini memberikan peluang tak terbatas. Dengan AI, big data, dan IoT, kita bisa mengembangkan aplikasi yang lebih pintar dan efisien," ujar seorang Peneliti Muda. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang potensi teknologi digital terkini, yang sejalan dengan temuan kami mengenai *mindset forward-looking* dan optimisme terhadap inovasi, serta dorongan untuk peningkatan kualitas dan pengalaman pengguna.

3) Antusiasme Masyarakat yang Tinggi

Dukungan dan antusiasme masyarakat terhadap program inovasi merupakan aset yang sangat berharga dan tidak dapat dibeli dengan uang. Ketika masyarakat merasa terbantu dan puas dengan inovasi yang dikembangkan, mereka akan menjadi advokat dan pengadopsi awal untuk inovasi-inovasi berikutnya. *Feedback* positif dari masyarakat juga menjadi motivasi bagi aparatur untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Respon positif masyarakat terhadap program inovasi menjadi peluang besar:

"Masyarakat sangat antusias dengan aplikasi-aplikasi yang kami buat. Mereka merasa terbantu dan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi." (Widodo, Tokoh Masyarakat Wonogiri)

Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan telah tepat sasaran dan memberikan value yang nyata bagi pengguna. Perasaan "terbantu" yang dirasakan masyarakat mengindikasikan bahwa inovasi tersebut telah berhasil mengatasi pain points atau memenuhi needs yang sebelumnya tidak terpenuhi dengan baik. Dampak motivasional bagi aparatur menunjukkan adanya feedback loop yang positif antara kepuasan masyarakat dan semangat berinovasi dari aparatur. Hal ini menciptakan lingkaran inovasi yang berkelanjutan dan memperkuat diri.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, peneliti mencatat bahwa masyarakat sangat antusias dengan aplikasi-aplikasi yang kami buat. Mereka merasa terbantu dan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi, demikian disampaikan oleh seorang Tokoh Masyarakat Wonogiri. Antusiasme ini secara jelas menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan telah tepat sasaran dan memberikan nilai tambah yang signifikan, sekaligus menjadi sumber motivasi yang kuat bagi aparatur untuk terus menciptakan solusi yang lebih baik.

d. Ancaman

1) Persaingan dengan Daerah Lain

Kompetisi antar daerah dalam bidang inovasi semakin intensif seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam berbagai bidang, termasuk inovasi layanan publik. Persaingan ini dapat menjadi ancaman bagi daerah yang sudah

established seperti Wonogiri, karena daerah lain akan berusaha belajar dari Praktik terbaik dan bahkan mencoba untuk mengungguli prestasi yang telah dicapai.

Kompetisi yang semakin ketat antar daerah dalam bidang inovasi:

"Daerah lain juga tidak tinggal diam. Mereka terus berinovasi dan mencoba mengalahkan prestasi kita. Ini tekanan tersendiri untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas inovasi." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Kesadaran tentang aktivitas inovasi daerah lain menunjukkan pemahaman yang baik tentang *competitive landscape* dan pentingnya *competitive intelligence*. Pengakuan bahwa daerah lain "mencoba mengalahkan prestasi kita" menunjukkan realitas persaingan yang sehat namun intens dalam bidang inovasi daerah. Perasaan "tekanan" yang dirasakan dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi dapat menjadi motivasi untuk terus *improve*, namun di sisi lain dapat menciptakan stress dan pressure yang kontraproduktif jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini menuntut strategic thinking yang lebih advanced untuk mempertahankan *competitive advantage*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Riset dan Inovasi yang menyatakan adanya "tekanan tersendiri untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas inovasi" karena daerah lain terus berinovasi dan berusaha mengalahkan prestasi yang ada, serta observasi terhadap berbagai praktik terbaik inovasi di daerah lain yang mengindikasikan intensitas persaingan, dan ditunjang oleh dokumentasi kebijakan inovasi daerah yang semakin marak, dapat disimpulkan bahwa persaingan antar daerah dalam

bidang inovasi menjadi tantangan signifikan bagi daerah yang telah mapan seperti Wonogiri. Fenomena ini menuntut adanya strategi yang lebih matang dan berkelanjutan untuk menjaga keunggulan kompetitif di tengah lanskap persaingan yang semakin dinamis.

2) Perubahan regulasi

Dinamika perubahan regulasi yang cepat merupakan tantangan tersendiri dalam implementasi inovasi daerah. Perubahan regulasi dapat berdampak pada validitas hukum dari inovasi yang sedang dikembangkan, *compliance requirements* yang harus dipenuhi, dan bahkan fundamental assumptions yang mendasari design suatu inovasi. Ketidakpastian regulasi dapat menghambat investasi dalam inovasi dan menciptakan *compliance risk*.

Dinamika perubahan regulasi yang cepat dapat mempengaruhi program inovasi:

"Regulasi di tingkat pusat kadang berubah cepat. Kita harus adaptif agar program-program inovasi tetap compliance dengan aturan yang berlaku."
(Suci Lestari, Penelaah Teknis Kebijakan)

Pengakuan tentang kecepatan perubahan regulasi menunjukkan pemahaman yang realistik tentang dinamika lingkungan kebijakan yang dihadapi pemerintah daerah. Kebutuhan untuk "adaptif" menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya tentang creating something new, tetapi juga tentang maintaining Relevansi dalam konteks perubahan yang terus menerus. Fokus pada Kepatuhan menunjukkan kesadaran tentang pentingnya Keberlanjutan Hukum dari inovasi yang dikembangkan. Hal ini

menuntut kemampuan monitoring regulasi dan adaptasi yang cepat, yang memerlukan *resource* dan *capability khusus*.

Dari perspektif peneliti, data wawancara dengan Penelaah Teknis Kebijakan yang menekankan perlunya "adaptif agar program-program inovasi tetap compliance dengan aturan yang berlaku" akibat "regulasi di tingkat pusat kadang berubah cepat", ditambah dengan observasi terhadap berbagai inisiatif inovasi daerah yang seringkali memerlukan penyesuaian mendadak, serta didukung oleh analisis dokumentasi peraturan perundang-undangan yang menunjukkan frekuensi perubahan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa dinamika perubahan regulasi yang cepat menjadi tantangan fundamental dalam implementasi inovasi daerah. Ketidakpastian hukum yang timbul dari perubahan ini berpotensi menghambat pengembangan inovasi, menimbulkan risiko ketidakpatuhan, dan menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kapasitas adaptasi regulasi yang kuat serta sistem monitoring yang efektif.

3) Keterbatasan sumber daya regional

Sebagai daerah dengan skala yang relatif tidak besar dibandingkan dengan daerah metropolitan, Kabupaten Wonogiri menghadapi keterbatasan natural dalam hal kumpulan keahlian dan Basis sumber daya. Keterbatasan ini dapat menghambat pengembangan inovasi yang memerlukan pengetahuan khusus atau Investasi Signifikan. Kompetisi untuk mendapatkan talent dan resource dengan daerah yang lebih besar dan *wealthy* juga menjadi tantangan tersendiri.

Keterbatasan sumber daya di tingkat regional dapat menghambat inovasi:

"Sebagai daerah yang tidak terlalu besar, kita terbatas dalam hal SDM ahli dan anggaran. Harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya yang ada." (Mursid Suroto, Sekretaris BAPPERIDA)

Pengakuan tentang keterbatasan sebagai daerah yang "tidak terlalu besar" menunjukkan *realistic assessment* tentang *positioning* dan *competitive disadvantage* yang dihadapi. Keterbatasan SDM ahli mengindikasikan challenge dalam mengakses specialized knowledge dan advanced skills yang diperlukan untuk inovasi yang sophisticated. Keterbatasan anggaran mempengaruhi scale dan scope dari inovasi yang dapat dikembangkan. Namun, pendekatan "pintar-pintar memanfaatkan sumber daya yang ada" menunjukkan mindset resourcefulness dan *creative problem solving* yang dapat menjadi keunggulan kompetitif tersendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BAPPERIDA yang mengakui bahwa sebagai daerah yang "tidak terlalu besar, kita terbatas dalam hal SDM ahli dan anggaran" serta perlu "pintar-pintar memanfaatkan sumber daya yang ada", dikombinasikan dengan observasi terhadap skala proyek inovasi yang cenderung lebih terbatas, dan didukung oleh analisis data demografi serta laporan keuangan daerah yang mengkonfirmasi keterbatasan anggaran dan basis keahlian dibandingkan daerah metropolitan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya regional merupakan tantangan signifikan bagi Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan inovasi. Keterbatasan ini mencakup aspek sumber daya

manusia ahli dan anggaran, namun diimbangi dengan potensi keunggulan dalam hal *resourcefulness* dan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada.

2. Alternatif Strategi Pengembangan Inovasi Kabupaten Wonogiri

a. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi SO pertama adalah mengoptimalkan komitmen kepemimpinan yang kuat dan *track record* yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang dukungan dari pemerintah pusat. Kredibilitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting untuk mengakses berbagai program dukungan teknis dan finansial dari pusat. Kombinasi antara komitmen internal dan dukungan eksternal ini dapat menciptakan sinergi yang powerful untuk pengembangan inovasi yang lebih advanced.

"Dengan track record yang baik dan komitmen kepemimpinan yang kuat, kita lebih mudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Proposal-proposal inovasi kita sering disetujui karena kredibilitas yang sudah terbangun." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Kemudahan dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa investasi dalam membangun kredibilitas telah memberikan return yang signifikan. Tingkat *approval* yang tinggi untuk proposal-proposal inovasi mengindikasikan adanya *trust* dan *confidence* dari pusat terhadap kemampuan Kabupaten Wonogiri dalam mengelola program inovasi. Hal ini menciptakan Lingkaran umpan balik positif di mana kesuksesan menghasilkan lebih banyak kesuksesan. Kredibilitas yang telah terbangun menjadi aset intangible yang sangat berharga dan sulit ditiru oleh kompetitor.

Strategi ini menunjukkan pentingnya reputation management dalam pengembangan inovasi daerah.

Strategi kedua adalah mengintegrasikan sistem koordinasi yang solid dengan peluang teknologi digital untuk mengembangkan inovasi secara berkelanjutan. Kemampuan koordinasi yang baik memungkinkan pengembangan inovasi yang terintegrasi dan saling menguatkan antar sektor. Pemanfaatan teknologi digital yang berkembang pesat dapat menghasilkan inovasi yang lebih canggih dan ramah pengguna.

Mengoptimalkan kemampuan koordinasi yang baik untuk mengembangkan inovasi digital:

"Tim kami yang solid memungkinkan pengembangan aplikasi secara berkelanjutan. CMK terus dikembangkan fitur-fiturnya berdasarkan feedback dari lapangan." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Soliditas tim menjadi foundation yang kuat untuk sustainability dalam pengembangan inovasi. Pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan aplikasi menunjukkan orientasi jangka panjang dan commitment terhadap peningkatan berkelanjutan. Pengembangan fitur berdasarkan *feedback* dari lapangan menunjukkan pendekatan yang berpusat pada pengguna dan berbasis Bukti dalam pengembangan inovasi. Hal ini menciptakan produk yang semakin relevan dan useful bagi pengguna. Strategi ini sejalan dengan konsep agile development yang menekankan peningkatan berulang dan *responsiveness* terhadap kebutuhan pengguna.

Berdasarkan analisis data yang mencakup wawancara dengan Kepala BAPPERIDA yang didukung oleh observasi terhadap berbagai program inovasi

daerah yang menunjukkan adanya kepercayaan dari pemerintah pusat dan pengembangan berkelanjutan pada aplikasi CMK, serta dokumentasi yang mengindikasikan adanya komitmen kepemimpinan yang kuat dan tim yang solid, maka dapat dirumuskan dua strategi SO (*Strengths-Opportunities*). Pertama, mengoptimalkan komitmen kepemimpinan yang kuat dan *track record* yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang dukungan dari pemerintah pusat, dengan menjadikan kredibilitas sebagai modal utama dalam mengakses dukungan teknis dan finansial. Kedua, mengintegrasikan sistem koordinasi yang solid dengan peluang teknologi digital untuk mengembangkan inovasi secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan soliditas tim dan *feedback* lapangan untuk pengembangan aplikasi yang relevan dan terus meningkat, sejalan dengan prinsip *agile development*.

b. Strategi ST (*Strengths-Threats*)

Strategi ST pertama adalah memanfaatkan pengalaman dan track record yang solid untuk menghadapi intensifikasi persaingan antar daerah. Pengalaman yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun menjadi parit kompetitif yang dapat digunakan untuk mempertahankan posisi leadership dalam inovasi daerah. Pengetahuan mendalam tentang "formula yang tepat" menjadi pengetahuan kepemilikan yang sulit ditiru oleh kompetitor.

Memanfaatkan pengalaman untuk menghadapi persaingan:

"Pengalaman 5 tahun berturut-turut menjadi modal untuk tetap unggul. Kita tahu formula yang tepat dan terus memperbaikinya agar tetap di depan." (Heru Utomo, Kepala BAPERIDA)

Pengalaman lima tahun berturut-turut sebagai pemenang memberikan institutional memory yang sangat berharga tentang Praktik terbaik dan Pelajaran. Pengetahuan tentang "formula yang tepat" menunjukkan adanya pengetahuan diam-diam yang telah terinternalisasi dalam organisasi. Komitmen untuk "terus memperbaiki" menunjukkan mindset kaizen dan Peningkatan berkelanjutan yang essential untuk mempertahankan Keunggulan kompetitif. Strategi ini menunjukkan bahwa *competitive advantage* tidak hanya tentang Mencapai Keunggulan, tetapi juga tentang sustaining excellence melalui Inovasi berkelanjutan dan penyempurnaan.

Strategi kedua adalah menggunakan kekuatan sistem koordinasi dan komitmen kepemimpinan untuk mengembangkan portfolio inovasi yang beragam guna mengantisipasi tekanan persaingan. Diversifikasi program inovasi tidak hanya mengurangi risiko dependency pada satu atau dua program unggulan, tetapi juga menciptakan *multiple sources of competitive advantage* yang sulit ditiru secara keseluruhan.

"Kita tidak boleh puas dengan satu atau dua inovasi saja. Harus terus mengembangkan program baru agar tidak mudah ditiru dan dikalahkan daerah lain." (Suci Lestari, Penelaah Teknis Kebijakan)

Kesadaran untuk tidak puas dengan pencapaian yang sudah ada menunjukkan growth mindset dan ambisi untuk terus berkembang. Strategi diversifikasi program inovasi menunjukkan pemahaman tentang pentingnya portfolio approach dalam innovation management. Tujuan agar "tidak mudah ditiru dan dikalahkan" menunjukkan *strategic thinking* tentang keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pendekatan ini menciptakan Ekosistem Inovasi yang kuat dan tangguh terhadap *competitive pressure*.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penyusunan Program yang menyatakan, dikombinasikan dengan observasi terhadap upaya berkelanjutan dalam penyempurnaan inovasi dan pengembangan portofolio, serta dokumentasi yang menunjukkan adanya *institutional memory* dan komitmen terhadap *growth mindset*, dapat dirumuskan dua strategi ST (*Strengths-Threats*). Pertama, memanfaatkan pengalaman dan *track record* solid sebagai modal untuk mempertahankan kepemimpinan dalam menghadapi persaingan antar daerah melalui penyempurnaan berkelanjutan pada inovasi yang sudah ada. Kedua, menggunakan kekuatan sistem koordinasi dan komitmen kepemimpinan untuk mengembangkan portofolio inovasi yang beragam, guna menciptakan keunggulan kompetitif yang tangguh dan sulit ditiru oleh daerah lain.

c. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Strategi WO pertama adalah memanfaatkan dukungan kebijakan dan program pusat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan SDM dalam bidang teknologi. Berbagai program pelatihan dan kapasitas yang disediakan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk upgrading skills dan knowledge SDM daerah. Investasi dalam human capital development ini akan memberikan return jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas dan inovasi.

Memanfaatkan dukungan pusat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan:

"Kita aktif mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Kemendagri dan lembaga lain. Ini membantu meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi." (Sri Wahyuni, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Proaktivitas dalam mengikuti pelatihan menunjukkan recognition terhadap pentingnya continuous learning dalam era yang berubah cepat. Pemanfaatan program pelatihan dari berbagai lembaga menunjukkan *strategic approach* dalam mengakses pengetahuan eksternal dan keahlian. Focus pada peningkatan kapasitas di bidang teknologi menunjukkan alignment dengan trend digitalisasi dan kebutuhan organisasi. Strategi ini sejalan dengan teori Arifin dan Rakhmawati (2020) yang menekankan bahwa investasi dalam pengembangan SDM akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi pemerintah.

Strategi kedua adalah mengatasi keterbatasan anggaran untuk infrastruktur TI melalui pemanfaatan peluang kemitraan dengan sektor swasta. Partnership publik-swasta dapat menjadi solusi win-win di mana pemerintah mendapatkan akses infrastruktur tanpa investment yang besar, sementara swasta mendapatkan market dan revenue stream yang sustainable.

"Keterbatasan anggaran kita atasi dengan bermitra dengan provider telekomunikasi dan vendor teknologi. Mereka juga mendapat benefit dari kerjasama ini." (Galuh Sulistyaning, Jf Pranata Komputer Pelaksana)

Pendekatan partnership untuk mengatasi keterbatasan anggaran menunjukkan *creative problem solving* dan *strategic thinking*. Kemitraan dengan provider telekomunikasi dan vendor teknologi membuka akses kepada prasarana dan keahlian yang mahal jika harus dibangun sendiri. Pengakuan bahwa partner juga "mendapat benefit" menunjukkan pemahaman tentang pentingnya creating mutual value dalam partnership. Strategi ini menciptakan sustainable collaboration model yang tidak bergantung pada charity atau CSR semata, tetapi pada Kasus bisnis yang solid.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ditambah dengan observasi terhadap partisipasi aktif dalam pelatihan dan adanya kemitraan dengan sektor swasta, serta didukung oleh teori yang menekankan pentingnya investasi SDM dan model kolaborasi yang saling menguntungkan, dapat dirumuskan dua strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*). Pertama, memanfaatkan dukungan kebijakan dan program pusat, khususnya pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan lembaga lain, untuk mengatasi kesenjangan kemampuan SDM di bidang teknologi, sebagai investasi dalam *human capital development*. Kedua, mengatasi keterbatasan anggaran untuk infrastruktur TI melalui pemanfaatan peluang kemitraan dengan sektor swasta, khususnya provider telekomunikasi dan vendor teknologi, guna menciptakan akses infrastruktur dan keahlian melalui model kolaborasi yang saling menguntungkan.

d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Strategi WT pertama adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan *impact* yang maksimal sambil mengantisipasi tekanan persaingan. Dalam kondisi keterbatasan anggaran dan persaingan yang ketat, efisiensi menjadi kunci untuk mempertahankan competitiveness. Focus pada inovasi yang Efektif namun high-impact menunjukkan strategic prioritization yang tepat.

"Dengan anggaran terbatas, kita harus lebih efisien. Setiap rupiah harus memberikan impact maksimal. Kita prioritaskan inovasi yang cost-effective tapi high-impact." (Fitri Pudtranti, Kepala Sub Bagian Keuangan)

Emphasis pada efisiensi menunjukkan discipline dalam resource management dan performance orientation. Prinsip bahwa "setiap rupiah harus memberikan impact maksimal" menunjukkan akuntabilitas dan pola pikir nilai untuk uang. Prioritas pada inovasi yang "Efektif tapi high-impact" menunjukkan Fokus strategis dan *ability* untuk membuat pilihan sulit. Strategi ini mengubah keterbatasan menjadi forcing function untuk innovation dan *creative problem solving*.

Strategi kedua adalah membangun kemitraan regional untuk mengatasi keterbatasan sumber daya sambil menghadapi ancaman perubahan regulasi dan persaingan. Kolaborasi regional dapat menciptakan *economies of scale, shared learning*, dan *collective bargaining power* yang menguntungkan semua pihak. Sharing pengalaman dan sumber daya dapat memperkuat kapasitas semua daerah yang terlibat.

"Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kita menjalin kerjasama dengan daerah sekitar. Saling berbagi pengalaman dan sumber daya."
(Mursif Suroto, Sekretaris BAPPERIDA)

Inisiatif untuk menjalin kerjasama regional menunjukkan *perspective* yang *collaborative* daripada *zero-sum competition*. Konsep "saling berbagi pengalaman dan sumber daya" menunjukkan mutual benefit *approach* yang sustainable. Strategi ini dapat menciptakan regional *innovation ecosystem* yang saling menguatkan. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan bargaining power dalam dealing dengan pemerintah pusat dan menciptakan *collective learning* yang mempercepat *innovation diffusion*.

3. Prioritas Strategi untuk Menjadi Kabupaten Terinovatif

a. Pengembangan Ekosistem Inovasi Terintegrasi

Berdasarkan analisis SWOT yang komprehensif, strategi prioritas utama yang harus dilaksanakan adalah membangun ekosistem inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ekosistem inovasi yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, akademisi sebagai sumber pengetahuan dan riset, sektor swasta sebagai implementer dan penyedia solusi teknologi, serta masyarakat sebagai *end-user dan beneficiary*. Konsep ekosistem ini sejalan dengan model quadruple helix yang menekankan kolaborasi multi-stakeholder dalam pengembangan inovasi.

"Prioritas utama kita adalah membangun ekosistem inovasi yang melibatkan semua stakeholder. Pemerintah sebagai fasilitator, akademisi sebagai think tank, swasta sebagai implementer, dan masyarakat sebagai pengguna." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Visi untuk membangun ekosistem inovasi yang melibatkan semua stakeholder menunjukkan pemahaman yang holistic tentang kompleksitas pengembangan inovasi. Positioning pemerintah sebagai "fasilitator" rather than controller menunjukkan paradigma baru dalam *governance* yang lebih collaborative dan enabling. Peran akademisi sebagai "think tank" mengakui pentingnya *research* dan *knowledge* dalam *innovation process*. **Involvement** sektor swasta sebagai "implementer" menunjukkan *appreciation* terhadap *private sector efficiency* dan *market orientation*. Penempatan masyarakat sebagai "pengguna" menekankan *user-centric approach* dalam *innovation development*. Strategi ini menciptakan sustainable *innovation ecosystem* yang tidak bergantung pada satu actor saja, melainkan pada *collective capability* dari semua stakeholder.

b. Penguatan kapasitas institusi

Strategi pendukung yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas institusi secara berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan merupakan fondasi yang menentukan sustainability dan *scalability* dari inovasi yang dikembangkan. Tanpa institusi yang kuat, inovasi akan bersifat ad-hoc dan tidak *sustainable*. Penguatan kapasitas institusi mencakup tiga dimensi utama: *organizational capacity*, *human capacity*, dan *system capacity* yang harus dikembangkan secara simultan dan terintegrasi.

"Tanpa penguatan institusi, inovasi tidak akan berkelanjutan. Kita terus memperkuat kapasitas organisasi, SDM, dan sistem yang ada." (Mursid Suroto, Sekretaris BAPPERIDA)

Kesadaran bahwa "tanpa penguatan institusi, inovasi tidak akan berkelanjutan" menunjukkan *understanding* yang mendalam tentang fundamental *requirement* untuk *sustainable innovation*. *Recognition* terhadap perlunya strengthening "kapasitas organisasi, SDM, dan sistem" menunjukkan comprehensive approach dalam institutional development. Kapasitas organisasi berkaitan dengan *structure*, *governance*, dan *culture* yang mendukung innovation. Human capacity terkait dengan pengetahuan, Keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk Inovasi. Kapasitas sistem meliputi *processes*, *procedures*, dan *infrastructure* yang enabling innovation. *Integrated approach* dalam mengembangkan ketiga dimensi ini akan menciptakan *institutional capability* yang robust dan *adaptive*.

c. Strategi operasional pengembangan aplikasi unggulan

Pada level operasional, focus pada pengembangan aplikasi unggulan yang memiliki impact langsung dan signifikan terhadap improvement kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas strategis. Aplikasi unggulan berfungsi sebagai flagship innovation yang menjadi *showcase* dari *capability* inovasi daerah. Success dari aplikasi unggulan dapat menciptakan *positive spillover effect* dan momentum untuk pengembangan inovasi lainnya.

Fokus pada pengembangan aplikasi unggulan yang berdampak langsung pada masyarakat:

"CMK dan Mitra Desa adalah flagship innovation kita. Kedua aplikasi ini terus dikembangkan dan direplikasi untuk sektor lain." (Heru Utomo, Kepala BAPPERIDA)

Positioning CMK dan Mitra Desa sebagai "flagship innovation" menunjukkan *strategic focus* pada *applications* yang telah terbukti *successful* dan *impactful*. Komitmen untuk "terus dikembangkan" menunjukkan continuous improvement *approach* yang essential untuk maintaining *relevance* dan *effectiveness*. Rencana untuk "direplikasi untuk sektor lain" menunjukkan *scalability thinking* dan *leverage strategy* untuk *maximizing return on innovation investment*. Strategi ini menciptakan platform innovation yang dapat diadaptasi untuk berbagai use cases dan sectors, sehingga increasing efficiency dalam innovation development process.

d. Evaluasi dan penyesuaian strategi

Komponen terakhir yang tidak boleh diabaikan adalah establishment dari *robust monitoring, evaluation, dan adaptive management system*. Dalam

environment yang dinamis dan *competitive*, kemampuan untuk *quickly adapt* dan *adjust strategy* menjadi critical success factor. Regular evaluation memungkinkan *early detection* dari *issues* dan *opportunities*, sementara *adaptive capacity* memungkinkan rapid response terhadap changing circumstances.

"Strategi harus fleksibel dan adaptif. Setiap 6 bulan kita evaluasi dan sesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat."
(Heru Utomo, Kepala Bidang BAPPERIDA)

Penekanan pada fleksibilitas dan adaptivity strategy menunjukkan appreciation terhadap complexity dan uncertainty dalam innovation environment. Systematic evaluation setiap 6 bulan menunjukkan commitment terhadap evidence-based management dan continuous learning. Consideration terhadap "perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat" menunjukkan dual focus pada technological possibility dan social demand yang essential untuk successful innovation. Strategi ini menciptakan Organisasi pembelajaran Yang mampu mengoreksi diri dan perbaikan berkelanjutan, yang merupakan karakteristik utama dari pemimpin inovasi yang sukses.

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki foundation yang solid untuk mempertahankan dan meningkatkan status sebagai kabupaten terinovatif. Kombinasi antara kekuatan internal yang substantial, pemanfaatan peluang eksternal yang strategic, mitigasi kelemahan yang proactive, dan anticipation terhadap ancaman yang realistic menciptakan framework strategis yang comprehensive dan actionable. Namun demikian, sustainability dari competitive advantage ini memerlukan Keunggulan eksekusi, adaptasi berkelanjutan, dan

komitmen yang tak tergoyahkan dari semua stakeholder yang terlibat dalam ekosistem inovasi Kabupaten Wonogiri.

B. Pembahasan

1. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT

Analisis terhadap kekuatan internal Kabupaten Wonogiri menunjukkan tiga pilar utama yang menjadi fondasi keberhasilan dalam bidang inovasi. Komitmen kepemimpinan yang kuat menjadi faktor paling krusial, dimana dukungan penuh dari Bupati terhadap setiap upaya inovasi telah menciptakan iklim organisasi yang kondusif. Kepemimpinan yang menjadikan inovasi sebagai agenda utama dalam setiap rapat koordinasi menunjukkan transformasi paradigma dari kepemimpinan konvensional menuju kepemimpinan transformatif yang berorientasi pada perubahan. Hal ini sejalan dengan teori David (2017) yang menekankan bahwa strategi yang efektif memerlukan dukungan penuh dari pimpinan organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pengalaman dan rekam jejak yang baik sebagai Kabupaten Terinovatif selama lima tahun berturut-turut juga menjadi kekuatan yang tidak ternilai, karena menunjukkan konsistensi dan kemampuan untuk mempertahankan prestasi dalam jangka panjang.

Sistem koordinasi yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah menjadi kekuatan ketiga yang sangat penting dalam implementasi strategi inovasi. Mekanisme koordinasi rutin bulanan yang melibatkan semua OPD menunjukkan adanya sistem yang terstruktur untuk memastikan sinkronisasi dan sinergi antar

unit kerja. Tidak adanya ego sektoral dalam koordinasi antar bidang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi lintas sektoral, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan solusi-solusi komprehensif dan terintegrasi. Kondisi ini mencerminkan budaya organisasi yang matang dimana kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan sektoral. Sistem koordinasi yang efektif ini memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya dan minimalisasi konflik kepentingan dalam implementasi berbagai program inovasi.

Meskipun memiliki kekuatan yang solid, Kabupaten Wonogiri juga menghadapi beberapa kelemahan internal yang perlu diatasi. Keterbatasan anggaran untuk riset dan inovasi menjadi tantangan utama yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah. Namun, respons terhadap keterbatasan ini tidak dengan menyerah, melainkan dengan mencari solusi kreatif melalui optimalisasi anggaran dan kolaborasi dengan pihak lain. Strategi kemitraan untuk mengatasi keterbatasan dana menunjukkan pemahaman tentang pentingnya partnership dalam pengembangan inovasi. Kesenjangan kemampuan teknologi di antara sumber daya manusia juga menjadi kelemahan yang harus terus diatasi melalui program pelatihan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Farhani (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan sangat bergantung pada pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja di sektor publik.

Ketidakmerataan infrastruktur teknologi informasi antara kawasan perkotaan dan pedesaan menjadi kelemahan ketiga yang mempengaruhi implementasi inovasi digital. Koneksi internet yang belum optimal di beberapa desa terpencil berdampak langsung pada efektivitas aplikasi digital seperti CMK

di lapangan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital yang dapat menghambat pemerataan akses terhadap layanan digital dan mengurangi efektivitas program inovasi berbasis teknologi. Tantangan geografis dan ekonomi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi ini memerlukan strategi khusus untuk memastikan bahwa inovasi digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dari segi peluang eksternal, dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui regulasi inovasi daerah memberikan momentum yang sangat positif. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah tidak hanya memberikan payung hukum yang kuat, tetapi juga dukungan teknis dan finansial untuk program-program inovatif. Perkembangan teknologi digital yang pesat juga membuka peluang tak terbatas untuk mengembangkan inovasi yang lebih canggih dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data besar, dan internet untuk segala hal. Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program-program inovasi juga menjadi peluang besar, karena dukungan dan kepuasan masyarakat akan menciptakan lingkaran positif yang memotivasi aparatur untuk terus berinovasi. Respon positif masyarakat menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan telah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna.

Ancaman eksternal yang dihadapi Kabupaten Wonogiri cukup signifikan dan memerlukan strategi antisipasi yang tepat. Persaingan yang semakin ketat antar daerah dalam bidang inovasi menciptakan tekanan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas inovasi. Daerah lain yang terus

berinovasi dan mencoba mengalahkan prestasi Wonogiri menunjukkan realitas persaingan yang sehat namun intens dalam bidang inovasi daerah. Perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat juga dapat mempengaruhi validitas dan implementasi program inovasi yang sedang berjalan. Keterbatasan sumber daya regional sebagai daerah yang tidak terlalu besar dibandingkan daerah metropolitan juga menjadi tantangan dalam mengakses keahlian khusus dan anggaran yang memadai untuk pengembangan inovasi yang lebih sophisticated.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Wonogiri dalam konteks analisis SWOT menunjukkan bahwa daerah ini memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan statusnya sebagai kabupaten terinovatif. Kekuatan internal yang solid, terutama dalam hal kepemimpinan, pengalaman, dan koordinasi, menjadi modal dasar yang kuat. Meskipun terdapat kelemahan dalam hal anggaran, kemampuan teknologi, dan infrastruktur, hal ini dapat diatasi melalui strategi yang tepat dan pemanfaatan peluang eksternal yang tersedia. Ancaman yang ada memerlukan kewaspadaan dan strategi antisipasi yang proaktif, namun dengan fondasi yang kuat dan track record yang baik, Kabupaten Wonogiri memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan tersebut.

2. Alternatif Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Pengembangan Inovasi

Strategi Strengths-Opportunities (SO) yang dikembangkan Kabupaten Wonogiri menunjukkan pendekatan yang cerdas dalam memanfaatkan kekuatan internal untuk memaksimalkan peluang eksternal. Pemanfaatan komitmen

kepemimpinan yang kuat dan rekam jejak yang baik untuk meraih dukungan dari pemerintah pusat telah terbukti efektif dalam mengakses berbagai program bantuan teknis dan finansial. Kredibilitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga dan sulit ditiru oleh daerah lain. Tingkat persetujuan yang tinggi untuk proposal-proposal inovasi dari Kabupaten Wonogiri menunjukkan adanya kepercayaan dan keyakinan dari pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah ini dalam mengelola program inovasi. Hal ini menciptakan lingkaran positif dimana kesuksesan membawa lebih banyak kesuksesan dan peluang. Strategi ini sejalan dengan konsep reputation management dalam pengembangan inovasi daerah, dimana reputasi yang baik menjadi modal untuk mengakses sumber daya dan peluang yang lebih besar.

Pengembangan inovasi digital berkelanjutan melalui integrasi sistem koordinasi yang solid dengan pemanfaatan kemajuan teknologi menunjukkan pendekatan yang strategis dan terencana. Kemampuan koordinasi yang baik memungkinkan pengembangan inovasi yang terintegrasi dan saling menguatkan antar sektor, sementara pemanfaatan teknologi digital yang berkembang pesat menghasilkan inovasi yang lebih canggih dan ramah pengguna. Aplikasi CMK yang terus dikembangkan fitur-fiturnya berdasarkan umpan balik dari lapangan menunjukkan pendekatan yang berpusat pada pengguna dan berbasis bukti dalam pengembangan inovasi. Strategi ini mencerminkan konsep pengembangan yang lincah yang menekankan perbaikan berulang dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna. Soliditas tim menjadi fondasi kuat untuk keberlanjutan

dalam pengembangan inovasi, memastikan bahwa inovasi tidak hanya dibuat sekali tetapi terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Strategi Strengths-Threats (ST) yang diterapkan menunjukkan pendekatan defensif yang cerdas dalam menghadapi tekanan persaingan. Pemanfaatan pengalaman dan rekam jejak yang solid untuk menghadapi intensifikasi persaingan antar daerah menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Pengalaman lima tahun berturut-turut sebagai pemenang memberikan memori institusional yang sangat berharga tentang praktik terbaik dan pembelajaran dari pengalaman. Pengetahuan tentang formula yang tepat menjadi pengetahuan tersembunyi yang telah terinternalisasi dalam organisasi dan sulit untuk diduplikasi oleh pesaing. Komitmen untuk terus memperbaiki menunjukkan pola pikir perbaikan berkelanjutan yang penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Diversifikasi program inovasi juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau dua program unggulan, sekaligus menciptakan berbagai sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru secara keseluruhan.

Strategi Weaknesses-Opportunities (WO) menunjukkan kemampuan untuk mengubah kelemahan menjadi peluang melalui pemanfaatan sumber daya eksternal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan lembaga lain menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengatasi kesenjangan kemampuan teknologi. Investasi dalam pengembangan modal manusia ini akan memberikan hasil jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas dan kemampuan inovasi. Hal ini

sejalan dengan teori Arifin dan Rakhmawati (2020) yang menekankan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi pemerintah. Penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui kemitraan dengan sektor swasta juga menunjukkan solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Kemitraan dengan penyedia telekomunikasi dan vendor teknologi membuka akses kepada infrastruktur dan keahlian yang mahal jika harus dibangun sendiri, sekaligus menciptakan model kolaborasi yang berkelanjutan berdasarkan kasus bisnis yang solid.

Strategi Weaknesses-Threats (WT) menunjukkan pendekatan yang realistik dalam menghadapi tantangan ganda dari kelemahan internal dan ancaman eksternal. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dalam kondisi keterbatasan anggaran dan persaingan yang ketat. Prinsip bahwa setiap rupiah harus memberikan dampak maksimal menunjukkan akuntabilitas dan orientasi pada nilai yang tinggi. Prioritas pada inovasi yang efektif biaya namun berdampak tinggi menunjukkan fokus strategis dan kemampuan membuat pilihan yang sulit. Strategi ini mengubah keterbatasan menjadi pendorong untuk inovasi dan pemecahan masalah kreatif. Penguatan kolaborasi regional juga menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya sambil menghadapi ancaman perubahan regulasi dan persaingan. Kolaborasi regional dapat menciptakan skala ekonomi, pembelajaran bersama, dan kekuatan tawar-menawar kolektif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Keseluruhan alternatif strategi yang dikembangkan menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Setiap strategi dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan yang dihadapi, memanfaatkan peluang yang tersedia, dan mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul. Kombinasi antara strategi ofensif (SO), defensif (ST), adaptif (WO), dan survival (WT) memberikan fleksibilitas dalam implementasi sesuai dengan dinamika kondisi yang dihadapi. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang matang tentang kompleksitas lingkungan inovasi dan kebutuhan akan strategi yang beragam untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Hal ini juga menunjukkan kapasitas organisasi yang tinggi dalam perencanaan strategis dan manajemen risiko.

3. Prioritas Strategi untuk Menjadi Kabupaten Terinovatif

Prioritas strategi utama yang direkomendasikan adalah membangun ekosistem inovasi terintegrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ekosistem inovasi ini harus didukung oleh penguatan kapasitas institusi berkelanjutan, fokus pengembangan aplikasi unggulan, dan implementasi sistem evaluasi dan manajemen adaptif. Dengan demikian, kabupaten dapat mempertahankan dan meningkatkan status sebagai kabupaten terinovatif secara berkelanjutan. Analisis SWOT juga mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi ini. Dengan demikian, kabupaten dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Kelemahan dan ancaman yang dihadapi juga dapat diatasi

dengan mengembangkan strategi yang tepat. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Strategi ini juga dapat membantu kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis tentang kekuatan (*Strength*) Kabupaten Wonogiri, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, komitmen kepemimpinan yang kuat merupakan salah satu kekuatan utama kabupaten ini. Kedua, pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan juga merupakan kekuatan yang signifikan. Ketiga, sistem koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta juga merupakan kekuatan yang penting. Dengan demikian, kekuatan-kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kabupaten dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Namun, perlu diingat bahwa kekuatan-kekuatan ini juga dapat menjadi kelemahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami kekuatan-kekuatan ini secara lebih baik. Dengan demikian, kabupaten dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Analisis ini juga dapat membantu kabupaten untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan.

Kelemahan (*Weakness*) Kabupaten Wonogiri, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan anggaran merupakan salah satu

kelemahan utama kabupaten ini. Kedua, kesenjangan kemampuan teknologi SDM juga merupakan kelemahan yang signifikan. Ketiga, infrastruktur TI yang belum merata juga merupakan kelemahan yang penting. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kemampuan kabupaten dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Namun, perlu diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini juga dapat diperbaiki dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami kelemahan-kelemahan ini secara lebih baik. Dengan demikian, kabupaten dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan ini dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Analisis ini juga dapat membantu kabupaten untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan.

Peluang (*Opportunity*) Kabupaten Wonogiri, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, dukungan kebijakan pemerintah pusat merupakan salah satu peluang utama kabupaten ini. Kedua, perkembangan teknologi digital juga merupakan peluang yang signifikan. Ketiga, antusiasme masyarakat yang tinggi juga merupakan peluang yang penting. Dengan demikian, peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kabupaten dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Namun, perlu diingat bahwa peluang-peluang ini juga dapat menjadi ancaman jika tidak

dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami peluang-peluang ini secara lebih baik. Dengan demikian, kabupaten dapat memanfaatkan peluang-peluang ini untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Analisis ini juga dapat membantu kabupaten untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang perlu dihadapi. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Ancaman-ancaman yang dihadapi juga dapat diatasi dengan mengembangkan strategi yang tepat. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan.

Ancaman (Threat) Kabupaten Wonogiri, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, persaingan antar daerah merupakan salah satu ancaman utama kabupaten ini. Kedua, perubahan regulasi juga merupakan ancaman yang signifikan. Ketiga, keterbatasan sumber daya regional juga merupakan ancaman yang penting. Dengan demikian, ancaman-ancaman ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kemampuan kabupaten dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Namun, perlu diingat bahwa ancaman-ancaman ini juga dapat diatasi dengan mengembangkan strategi yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami ancaman-ancaman ini secara lebih baik. Dengan demikian, kabupaten dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman-ancaman ini dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi

tantangan. Analisis ini juga dapat membantu kabupaten untuk mengidentifikasi prioritas strategi yang perlu diterapkan. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan.

Prioritas strategi untuk menjadi kabupaten terinovatif dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Pertama, kabupaten perlu membangun ekosistem inovasi terintegrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kedua, kabupaten perlu mengembangkan strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Ketiga, kabupaten perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, kabupaten dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan. Strategi ini juga dapat membantu kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengembangkan strategi untuk menjadi kabupaten terinovatif, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus. Pertama, kabupaten perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kedua, kabupaten perlu mengembangkan sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif. Ketiga, kabupaten perlu melakukan analisis dan interpretasi data yang akurat. Dengan demikian, kabupaten dapat mengetahui kemajuan dan hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan strategi untuk menjadi kabupaten terinovatif. Strategi ini juga dapat membantu kabupaten untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan.

BAB IV **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjadikan kabupaten terinovatif menggunakan analisis SWOT, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki posisi yang kuat dengan kekuatan internal yang solid berupa komitmen kepemimpinan yang kuat, pengalaman dan rekam jejak yang baik, serta sistem koordinasi antar OPD yang efektif. Meskipun menghadapi kelemahan dalam hal keterbatasan anggaran, kesenjangan kemampuan teknologi SDM, dan infrastruktur TI yang belum merata, hal ini dapat diatasi melalui pemanfaatan peluang eksternal berupa dukungan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan teknologi digital, dan antusiasme masyarakat yang tinggi. Ancaman persaingan antar daerah, perubahan regulasi, dan keterbatasan sumber daya regional memerlukan strategi antisipasi yang proaktif namun masih dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.
2. Alternatif strategi yang dikembangkan melalui matriks SWOT menghasilkan empat pendekatan komprehensif. Strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang melalui penguatan dukungan pusat dan pengembangan inovasi digital berkelanjutan. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman melalui penguatan keunggulan kompetitif dan diversifikasi program inovasi. Strategi WO mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang melalui peningkatan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur TI via kemitraan. Strategi WT menghadapi kelemahan dan ancaman melalui efisiensi

sumber daya dan penguatan kolaborasi regional. Keempat strategi ini saling melengkapi dan memberikan fleksibilitas dalam implementasi sesuai dengan dinamika kondisi yang dihadapi.

3. Prioritas strategi utama yang harus dilaksanakan adalah membangun ekosistem inovasi terintegrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dengan pemerintah sebagai fasilitator, akademisi sebagai sumber pengetahuan, sektor swasta sebagai implementer, dan masyarakat sebagai pengguna. Strategi ini didukung oleh penguatan kapasitas institusi berkelanjutan dalam tiga dimensi (organisasi, manusia, dan sistem), fokus pengembangan aplikasi unggulan yang berdampak langsung, serta implementasi sistem evaluasi dan manajemen adaptif yang memungkinkan penyesuaian strategi setiap enam bulan. Integrasi keempat elemen ini menciptakan framework strategis yang komprehensif dan saling menguatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan status Kabupaten Wonogiri sebagai kabupaten terinovatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi inovasi Kabupaten Wonogiri:

1. BAPPERIDA Kabupaten Wonogiri perlu mengembangkan sistem manajemen inovasi yang lebih terstruktur dengan membentuk unit khusus yang menangani koordinasi, monitoring, dan evaluasi semua program inovasi secara terpadu.

2. Untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur TI antara kawasan perkotaan dan pedesaan, BAPPERIDA perlu menyusun roadmap pemerataan infrastruktur digital yang jelas dengan prioritas pada daerah-daerah yang masih tertinggal.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih mendalam tentang dampak konkret dari program-program inovasi di Kabupaten Wonogiri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. n.
4. Masyarakat dapat berperan lebih aktif tidak hanya sebagai pengguna program inovasi tetapi juga sebagai *co-creator* dalam pengembangan solusi inovatif. Platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan ide, *feedback*, dan berpartisipasi dalam proses design thinking dapat memperkaya proses inovasi dan memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases*. Pearson Education.
- Indrawati, D., & Supriyani, I. (2023). *Pemerintahan yang efektif: Teori dan praktik dalam pelayanan publik*. Media Grup.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kelima). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kholifah, N., Suryani, L., & Pratama, A. (2021). *Inovasi pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2018). *Inovasi pendidikan*. Wade Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Analisis data kualitatif*. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). UI Press. (Karya asli diterbitkan 1994).
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur penelitian pendidikan*. Absolute Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Zuldafril. (2012). *Penelitian kualitatif*. Suska Press.

Jurnal

- Arifin, S., & Rakhmawati, Y. (2020). Pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 45-58.
- Dimamesa, R., & Seran, M. (2024). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program inovatif pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 78-92.
- Farhani, A. (2024). Pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Manajemen SDM*, 8(1), 23-36.

- Hidayat, T., Wijayanti, S., & Amrozi, Y. (2022). Analisis strategi keberhasilan *E-government* di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Governance Innovation*, 4(1), 14-26.
- Karuniyati, P., Muhammad, A. S., & Mahadiansar, M. (2021). Strategi kemandirian melalui program inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan. *Journal Publicuho*, 4(4), 999-1015.
- Miao, L., & Wei, J. (2020). Innovation in local government: Technology adoption and service improvement. *Public Administration Review*, 80(4), 612-625.
- Nasripani, N., Hendrayani, H., & Malina, M. (2025). Strategi Bappedalitbang dalam meningkatkan inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 6(2), 415-425.
- Pande, P. S. M. A. (2025). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan. *Jurnal Kajian Ruang*, 4(2), 171-184.
- Pratama, F. A. M. P. (2024). Strategi pemerintah Desa Dukuh dalam mengoptimalkan potensi ekonomi pariwisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 4(2), 185-198.
- Rahmandani, R., & Putri, C. (2022). Peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik di era transformasi digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 45-59.
- Robinson, T. K., Kiyai, B., & Mambo, R. (2019). Strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84), 92-105.
- Sari, R. (2021). Strategi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas harga guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kecamatan Batang Tuaka. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 10(2), 52-63.
- Sperling, K., & Arler, F. (2020). Local government innovation in the energy sector: A study of key actors' strategies and arguments. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 126, 109837.
- Vasstrøm, M., & Normann, R. (2019). The role of local government in rural communities: Culture-based development strategies. *Local Government Studies*, 45(6), 848-868.

Skripsi

- Kewa, M. A. (2024). *Strategi pemerintah desa dalam pengembangan potensi objek wisata air panas yang berkelanjutan (Studi kasus di Desa Mokantarak,*

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur). [Skripsi tidak dipublikasikan]. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Lidia, A. A. (2021). *Strategi pemberdayaan masyarakat oleh Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, DIY. [Skripsi tidak dipublikasikan]. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".*

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Online

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Daftar pemenang Innovative Government Award 2020-2024.*
<https://bskdn.kemendagri.go.id>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informasi Umum

1. **Nama Responden** : _____
2. **Jabatan/Posisi** : _____
3. **Lama berkarir di bidang ini:** _____

B. Pertanyaan Pembuka

1. Apa pandangan Anda mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai status kabupaten terinovatif?
2. Sejauh mana Anda terlibat atau menyaksikan implementasi strategi inovasi yang ada?

C. Pertanyaan Inti

1. Analisis *Strengths* (Kekuatan)

- Menurut Anda, apa saja kekuatan utama yang dimiliki Kabupaten Wonogiri dalam mendukung inovasi?
- Bagaimana potensi sumber daya yang ada di Wonogiri dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi?

2. Analisis *Weaknesses* (Kelemahan)

- Apa saja kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan strategi inovasi?
- Bagaimana kelemahan tersebut mempengaruhi efektivitas program-program inovatif?

3. Analisis *Opportunities* (Peluang)

- Apa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mencapai status inovatif?
- Adakah dukungan dari pihak luar (swasta, lembaga internasional, dan lain-lain) yang bisa dimanfaatkan?

4. Analisis *Threats* (Ancaman)

- Apa saja ancaman atau tantangan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan inovasi Kabupaten Wonogiri?
- Bagaimana strategis pemerintah dalam mengatasi ancaman yang dihadapi?

5. Strategi dan Implementasi

- Apa alternatif strategi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan inovasi?
- Menurut Anda, strategi mana yang paling efektif dan prioritas untuk diterapkan agar Wonogiri menjadi kabupaten terinovatif?

D. Rekomendasi

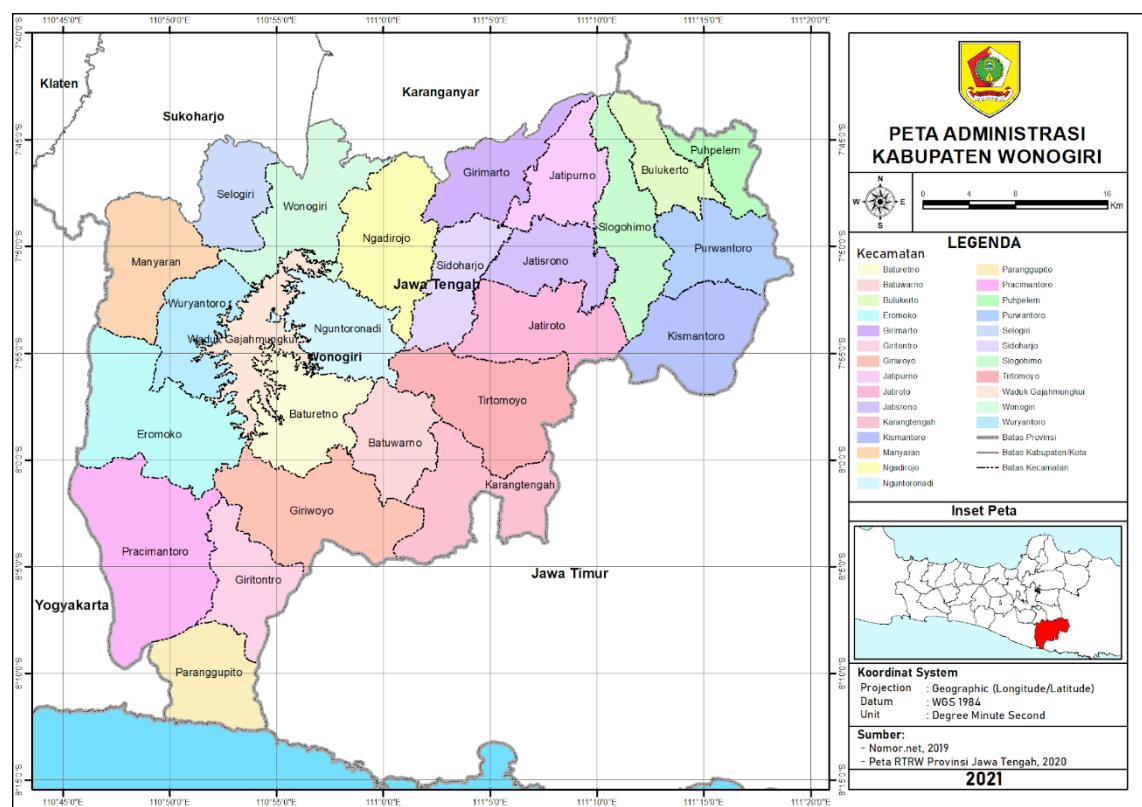
1. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas strategi inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri?
2. Apa harapan Anda terkait inovasi untuk masa depan Kabupaten Wonogiri?

E. Pertanyaan Penutup

- Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau mungkin ada topik penting yang belum dibahas?

--oOo--

PETA KABUPATEN WONOGIRI



SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" **PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN** STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 125/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Satrio Danan Jaya R
No. Mahasiswa : 21520058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 229/I/U/2025

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Wonogiri

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

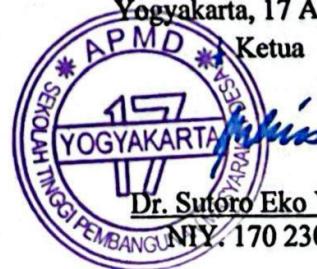
| | | |
|-------------------------|----------|---|
| Nama | : | Satrio Danan Jaya Ramadhan |
| No Mhs | : | 21520058 |
| Program Studi | : | Ilmu Pemerintahan |
| Judul Skripsi | : | Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Menjadikan Kabupaten Terinovatif menggunakan Analisis Swot |
| Tempat | : | <u>Kantor Bupati Kabupaten Wonogiri</u> |
| Dosen Pembimbing | : | <u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 135/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Satrio Danan Jaya Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 21520058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kantor Bupati Kabupaten Wonogiri
b. Sasaran : Strategi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Menjadikan Kabupaten Terinovatif menggunakan Analisis Swot
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 17 April 2025



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

DOKUMENTASI





